



LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON

BPBD KOTA CILEGON
Jl. Teuku Cik Ditiro No.164
Kel. Sukmajaya Kec. Jombang
Kota Cilegon 42416

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan karunia Nya sehingga penyusunan "**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023**" ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kota Cilegon ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP BPBD Kota Cilegon merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja BPBD dalam mencapai tujuan/sasaran strategis BPBD untuk mewujudkan VISI dan MISI BPBD. Melalui dokumen LKIP ini dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja yang telah ditargetkan didalam Rencana Kerja BPBD tahun 2022.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, sehingga LKIP BPBD Kota Cilegon Tahun 2022 dapat tersusun tepat waktu. Tentunya dalam pelaksanaan kinerja pelayanan penanggulangan bencana selama Tahun 2022 masih banyak kekurangan, sehingga kami memerlukan kritik dan saran yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja BPBD Kota Cilegon pada masa yang akan datang

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Cilegon, Januari 2023

Kepala Pelaksana

BPBD Kota Cilegon



Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si

NIP. 19630704 198410 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi BPBD Kota Cilegon	2
C. Struktur Organisasi BPBD Kota Cilegon	3
D. Sumber Daya Aparatur BPBD Kota Cilegon	5
E. Permasalahan Utama (<i>strategic issued</i>) yang dihadapi BPBD	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
B. Visi dan Misi	16
C. Tujuan dan Sasaran	18
D. Strategi Program dan Kegiatan	22
E. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Evaluasi dan Analisi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022	26
C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya	32
D. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Renstra 2021 – 2026	35
E. Analisis Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif yang dilakukan	36
F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Pencapaian Kinerja	37
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Pegawai BPBD berdasarkan Golongan	6
Tabel	1.2	Pegawai BPBD berdasarkan Eselon	7
Tabel	1.3	Pegawai BPBD berdasarkan Pendidikan	7
Tabel	1.4	Daftar Aset BPBD Kota Cilegon	8
Tabel	1.5	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	11
Tabel	2.1	Visi dan Misi RPJMD Kota Cilegon 2021-2026	18
Tabel	2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Cilegon	20
Tabel	2.3	Perjanjian Kinerja APBD-P Tahun 2022	23
Tabel	2.4	Anggaran APBD-P Tahun 2022	24
Tabel	3.1	Capaian Sasaran Tahun 2022	27
Tabel	3.2	Ketercapaian Indikator Sasaran terhadap Target	30
Tabel	3.3	Rekapitulasi Ketercapaian Indikator Sasaran terhadap Target Tahun 2022	31
Tabel	3.4	Perbandingan Realisasi Pencapaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	33
Tabel	3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja samapi dengan Tahun 2022 dengan Target Janka Menengah dalam Dokumen Renstra	36
Tabel	3.6	Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Tahun 2022	39
Tabel	3.7	Realisasi Anggaran Per Sasaran dan Program Pendukung Sasaran	41
Tabel	3.8	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja BPBD Kota Cilegon pada APBD-P T.A 2022	42

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka setiap instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas RPJMD Cilegon 2021-2026 yaitu penanganan kebencanaan.

Dalam penanggulangan bencana, BPBD Kota Cilegon menjalankan peran sebagai koordinator dan menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya tanggap darurat saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana (tanggap darurat) dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana).

Adapun tujuan, sasaran dan capaian kinerja BPBD kota Cilegon pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Realisasi kinerja	Renstra
				2022	
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	78,98	Poin 80
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,77	Poin 45
2	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan	80	100%
			Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	90	100%
			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100%

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita Pembangunan Daerah Kota Cilegon. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimize serta untuk memantapkan pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan negara, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Oleh sebab itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Adapun informasi yang diharapkan dari laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan RB No. 25 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja;
11. Keputusan Walikota Cilegon No. 060/kep.639-Bappeda/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan kinerja secara *Real-Time* dan terintegrasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon.

B. Tugas dan Fungsi BPBD Kota Cilegon

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran tugas dan fungsi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon. Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, komando dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku. tugas dan fungsi BPBD sebagai berikut:

1. Tugas

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penyelamatan evakuasi korban bencana, sistem dasar dan informasi bencana secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan penerimaan lain yang sah; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi BPBD Kota Cilegon

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon sebagai berikut :

I. Kepala Badan;

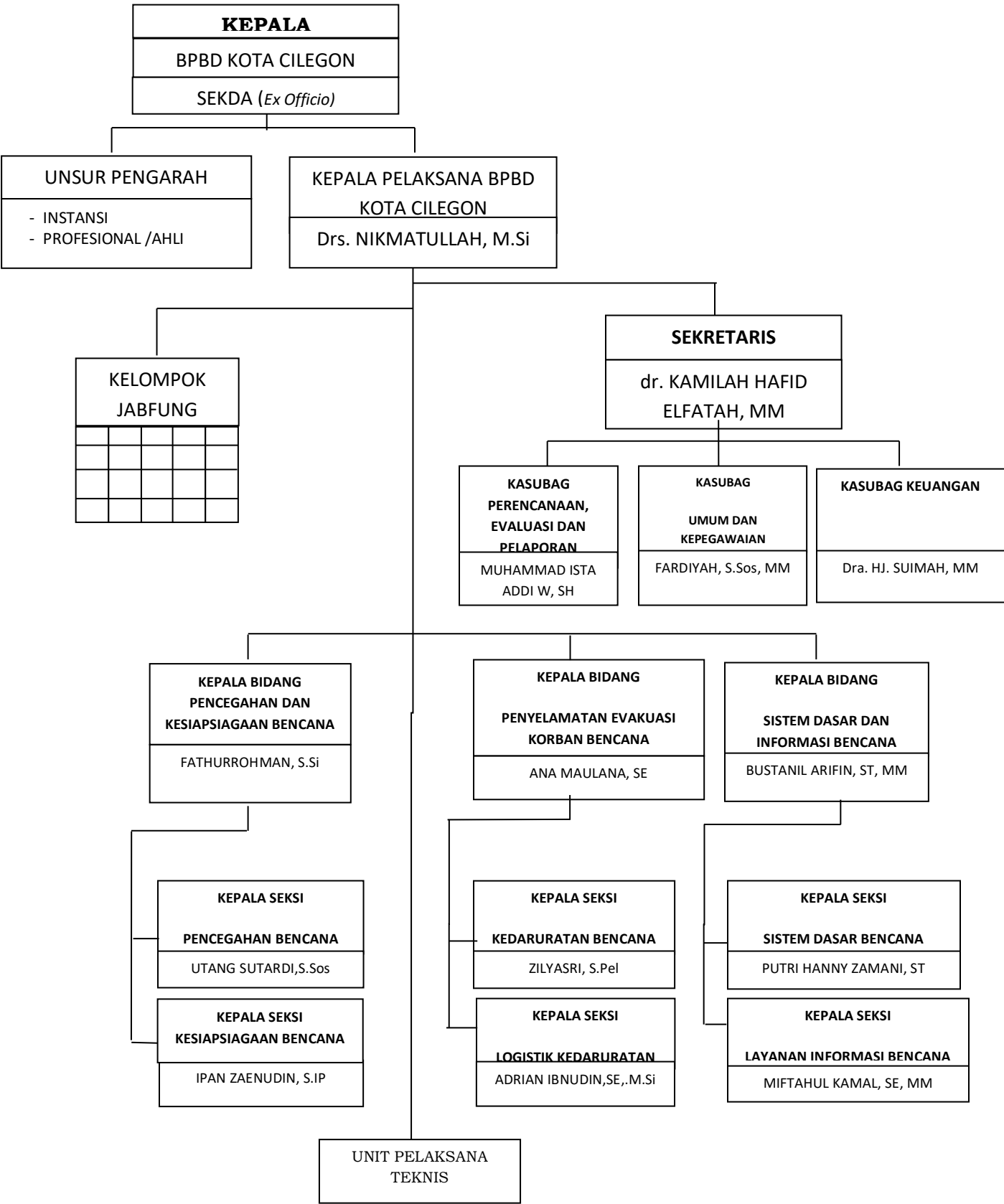
II. Unsur Pengarah;

III. Unsur Pelaksana; terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tanggap Darurat; dan
 - 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis

Sedangkan uraian tugas dan fungsi Kepala BPBD dan unsur pelaksana berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana DAERAH. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON**



D. Sumber Daya Aparatur BPBD Kota Cilegon

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon memiliki sumber daya antara lain menyangkut sumber daya manusia dan peralatan serta perlengkapan kantor.

Dari sisi **sumber daya manusia**, aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon terdiri dari para pegawai yang diurai menurut status kepegawaian, kepangkatan, tingkat pendidikan formal/fungsional/struktural, dan jenis kelamin, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pegawai BPBD Kota Cilegon
Berdasarkan Golongan Ruang

NO	GOLONGAN	PRIA	WANITA	TOTAL	KET
1.	IV	4	3	7	
2.	III	12	6	18	
3.	II	-	2	2	
JUMLAH		16	11	27	

Tabel 1.2
Pegawai BPBD Kota Cilegon Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	PRIA	WANITA	TOTAL	KET
1.	II	1		1	
2.	III	3	1	4	
3.	IV	6	3	9	
JUMLAH		10	4	14	

Tabel 1.3
Pegawai BPBD Kota Cilegon Berdasarkan Pendidikan Formal

NO	PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	TOTAL	KET
1.	S2	5	4	9	
2.	S1	9	5	14	
3.	D3	1	1	2	
4.	SLTA	1	1	2	
JUMLAH		16	11	27	

(Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD, Desember 2022)

Dari sisi aset yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dan diperoleh Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
DAFTAR ASET BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CILEGON TAHUN 2021

Jenis	Nama Alat	Jumlah
Kendaraan	Mobil Rescue	2
	Motor Operasional	6
	Motor Trail	7
	Pickup	3
	Mobil Personal Logistik (Monalog)	1
Alat Komunikasi	HT	35
	RIG (RADIO HF/FM)	8
	GPS	3
	EWS	1
	SSB/RPP	3
	Repeater Radio	2

Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Tenda Posko	3
	Tenda Keluarga	20
	Tenda Pengungsi	8
	Velbed	55
	Pompa Air	2
Alat Pencarian	Motor Boat	4
	Senter HID	2
	Chain Saw	4
	Perahu Fiber	2
Alat Listrik	Genset 5,5 KVA	7
	Genset 10 KVA	1
	Panel Genset	1
	Mesin Las Listrik	2
Alat Lainnya	Rescue Jaring Hernes	9
	Rak Besi Logistik	6

Sumber: Pengurus Barang BPBD, Desember 2021

E. Permasalahan Utama (*strategic Issued*) yang dihadapi BPBD

Kota Cilegon dengan luas wilayah 17.550 Ha sebagai kota perdagangan dan jasa dewasa ini banyak diminati oleh investor dalam dan luar negeri. Perkembangan pembangunan kota cilegon sampai dengan saat ini telah dirasakan peningkatan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan bertambahnya industri di kota cilegon dewasa ini tentunya menambah pula jumlah bangunan dan penduduk di Kota Cilegon.

Seiring dengan perkembangan kota, terdapat peningkatan kebutuhan akan pembangunan prasarana kota untuk memenuhi kebutuhan air bersih, drainase, persampahan, pengendalian banjir dan bencana lainnya serta juga adanya peningkatan jumlah bangunan fasilitas umum dan sosial termasuk ruang terbuka hijau. Kondisi ini tentunya bisa memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Cilegon. Dampak positifnya antara lain yaitu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon, sedangkan dampak negatifnya yaitu bisa timbul bencana.

Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Bencana alam

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

2. Bencana non alam

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

3. Bencana sosial

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Menurut data Indek Risiko Bencana Indonesia (IRBI) BNPB 2021, Kota Cilegon masuk dalam kategori kelas risiko sedang dengan skor 121.23 seperti yang terlihat dalam Tabel 1.5 dan ada 8 jenis ancaman potensi bencana di Kota Cilegon yaitu: banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gelombang ekstrem, abrasi, kebakaran hutan, cuaca ekstrem, dan kekeringan.

Tabel 1.5
INDEKS RISIKO BENCANA DI PROVINSI BANTEN
BERDASARKAN INDEKS RESIKO BENCANA INDONESIA (IRBI) BNPB
TAHUN 2021

I. INDEKS RISIKO BENCANA MULTI ANCAMAN

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	LEBAK	182.04	TINGGI
2.	PANDEGLANG	177.14	TINGGI
3.	KAB. SERANG	176.46	TINGGI
4.	KOTA SERANG	168.56	TINGGI
5.	TANGERANG	146.93	TINGGI
6.	KOTA TANGERANG	136.80	SEDANG
7.	KOTA CILEGON	121.23	SEDANG
8.	KOTA TANGERANG SELATAN	87.44	SEDANG
PROV. BANTEN		149.08	TINGGI

II. INDEKS RISIKO BENCANA BANJIR

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	KOTA TANGERANG	30.97	TINGGI
2.	KOTA SERANG	23.76	TINGGI
3.	KAB. SERANG	20.02	TINGGI
4.	KOTA CILEGON	19.35	TINGGI
5.	LEBAK	17.51	TINGGI
6.	TANGERANG	16.63	TINGGI
7.	PANDEGLANG	14.96	TINGGI

III. INDEKS RISIKO BENCANA GEMPA BUMI

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	KOTA TANGERANG	19.91	TINGGI
2.	KOTA SERANG	15.27	TINGGI
3.	KOTA TANGERANG SELATAN	13.94	TINGGI
4.	KOTA CILEGON	12.44	TINGGI
5.	SERANG	12.01	TINGGI
6.	LEBAK	10.51	SEDANG
7.	TANGGERANG	9.91	SEDANG
8.	PANDEGLANG	8.97	SEDANG

IV. INDEKS RISIKO BENCANA TSUNAMI

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	LEBAK	24.00	TINGGI
2.	KOTA SERANG	18.82	TINGGI
3.	PANDEGLANG	15.73	TINGGI
4.	KOTA CILEGON	13.74	TINGGI
5.	SERANG	13.43	TINGGI
6.	TANGERANG	13.11	TINGGI

V. INDEKS RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	KOTA TANGGERANG	10.32	SEDANG
2.	PANDEGLANG	9.97	SEDANG
3.	KOTA SERANG	8.20	SEDANG
4.	KOTA TANGERANG SELATAN	7.23	SEDANG
5.	KOTA CILEGON	6.91	SEDANG
6.	SERANG	6.67	SEDANG
7.	TANGERANG	5.54	RENDAH

VI. INDEKS RISIKO BENCANA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	SERANG	20.02	TINGGI
2.	LEBAK	17.51	TINGGI
3.	TANGGERANG	16.63	TINGGI
4.	KOTA SERANG	15.84	TINGGI
5.	PANDEGLANG	14.96	TINGGI
6.	KOTA CILEGON	13.82	TINGGI

VII. INDEKS RISIKO BENCANA KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	KOTA TANGERANG	30.97	TINGGI
2.	KOTA SERANG	24.60	TINGGI
3.	KOTA TANGERANG SELATAN	21,68	TINGGI
4.	KOTA CILEGON	20.74	TINGGI
5.	SERANG	20.02	TINGGI
6.	LEBAK	17.51	TINGGI
7.	TANGERANG	15.52	TINGGI
8.	PANDEGLANG	14.96	TINGGI

VIII. INDEKS RISIKO BENCANA CUACA EKSTRIM

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	KOTA TANGERANG	12.53	TINGGI
2.	KOTA SERANG	9.62	SEDANG
3.	KOTA TANGERANG SELATAN	8.77	SEDANG
4.	SERANG	7.56	SEDANG
5.	LEBAK	6.61	SEDANG
6.	TANGGERANG	6.28	SEDANG
7.	PANDEGLANG	5.65	SEDANG
8.	CILEGON	4.15	RENDAH

IX. INDEKS RISIKO BENCANA KEKERINGAN

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	KOTA TANGERANG	20.65	TINGGI
2.	KOTA SERANG	16.40	TINGGI
3.	KOTA TANGERANG SELATAN	14.45	TINGGI
4.	KOTA CILEGON	13.82	TINGGI
5.	SERANG	13.35	TINGGI
6.	LEBAK	11.67	TINGGI
7.	TANGERANG	11.08	TINGGI
8.	PANDEGLANG	9.97	SEDANG

Selain 8 risiko bencana di Kota Cilegon ini masih terdapat risiko bencana yaitu kegagalan teknologi. Hal ini dimungkinkan oleh adanya pengembangan kawasan industri berskala nasional maupun internasional yang secara langsung atau tidak sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Beberapa aktifitas yang dapat menimbulkan ancaman bencana kegagalan teknologi yang ada di Kota Cilegon antara lain kegiatan bongkar muat B3, penyimpanan dan penampungan limbah B3, proses produksi bahan kimia, keberadaan radioaktif di pabrik – pabrik di sekitar Cilegon, penempatan beberapa pipa interkoneksi yang berisi limbah B3, adanya pipa gas dan aktifitas industri lainnya.

Dalam perkembangannya di Kota Cilegon, untuk penanganan bencana sebelum OPD BPBD terbentuk, dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) yang

didalamnya terlibat beberapa OPD dan Instansi vertikal misalnya OPD Badan Kesbang linmas (Sekretariat Satlak PB), Unsur Kodim Cilegon, Unsur Polres Cilegon, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU, PMI, Tagana dan lain-lain, sehingga apabila terjadi bencana kelemahannya adalah sulitnya dalam koordinasi antar unsur dimaksud.

Menyadari adanya ancaman bencana dan sulitnya koordinasi antar instansi di Kota Cilegon, sebagai langkah antisipasi untuk pengurangan risiko bencana dan upaya mengurangi atau menghilangkan kerugian serta korban jiwa yang lebih besar bagi masyarakat, maka Pemerintah Kota membentuk Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Perda Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) BPBD Kota Cilegon Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program kegiatan dan anggaran BPBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 meliputi Rencana Strategis BPBD Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja 2022, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Mendeskripsikan tentang pencapaian kinerja yang berisi target kinerja, capaian realisasi data pembandingan tahun sebelumnya, analisa keberhasilan, kegagalan kinerja dan realisasi anggaran yang berisi realisasi keuangan selama satu tahun.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya,

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, dengan memperhitungkan potensi, peluang ataupun hambatan dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan. RENSTRA BPBD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

B. VISI DAN MISI

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon sangat dipengaruhi dan penjabaran yang lebih detail dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026. Adapun Visi dan Misi Kota Cilegon dapat

dilihat di tabel 2.1:

Tabel 2.1
VISI DAN MISI RPJMD KOTA CILEGON 2021 - 2026

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN DAN BERMATABAT	1 Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Peningkatan kualitas layanan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalisme aparatur
	2 Mewujudkan pendidikan yang berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan	Terwujudnya kualitas pendidikan yang merata
			Meningkatnya Kompetensi literasi masyarakat
	3 Meningkatkan pelayanan kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan individu
	4 Mewujudkan kesejahteraan yang merata	Pemerataan kesejahteraan masyarakat	Berkurangnya kualitas kesehatan masyarakat dan individu
			Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat
			Meningkatnya investasi dan pendapatan daerah
	5 Mewujudkan Masyarakat berperadaban	Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kota, prasarana dan utilitas permukiman
			Meningkatnya pelestarian budaya dan pengembangan destinasi wisata
			Stabilitas pangan, ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
			Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak, pemuda dan olahraga

(Sumber: RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026)

Dapat disimpulkan dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, BPBD Kota Cilegon mendukung pencapaian 2 (Dua) Sasaran Pemerintah Daerah yang terdapat pada Misi 1 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesional Aparatur dan pada Misi 5 yaitu Stabilitas Pangan, Ketangguhan Bencana, Kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama dan BPBD Kota Cilegon fokus pada pencapaian terhadap **Ketangguhan Bencana**.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Sasaran yang ditetapkan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagai Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan Tujuan dan Sasaran, berikut indikator dan target Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon pada tabel 2.2;

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Cilegon

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					kondisi Kinerja Awal Periode (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
					Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62,97	71,20	75,30	78,00	82,20	84,20
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur								
			Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	85,00
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	42,00	45,00	48,00	50,00	52,00	52,00
2.	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		Indeks Resiko bencana	Poin	135	130	125	120	115	110
		Meningkatnya ketangguhan bencana								
			Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

			Informasi Kebencanaan							
			Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

D. Strategi Program dan Kegiatan

Pendekatan penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dikaitkan dengan program prioritas yang tercantum dalam program dan kegiatan yang diamanatkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri No. 101 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan, dan guna mencapai sasaran tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon menyusun program sebagai berikut :

Adapun program prioritas yang dimaksud antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, yang meliputi kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- h. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, meliputi kegiatan:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

E. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Tahun 2021 -2026, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja BPBD Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja APBD-P Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	80
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		45
2	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan	%	100
		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%	100
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100

Berikut ini kami sampaikan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022 dengan Jumlah Anggaran setelah perubahan, Anggaran APBD-P Tahun 2022 pada 2 (Dua) Program sebesar **Rp. 11.583.181.223 (Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)** sebagai berikut:

Tabel 2.4
Anggaran APBD-P Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupetan/Kota	Rp. 8.390.588.242	APBD
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 3.192.592.981	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi.

Pada BAB ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kota Cilegon yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP BPBD Tahun 2022 ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kota Cilegon tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah Kota Cilegon. Pelaporan Kinerja BPBD Tahun 2022 ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama RENSTRA BPBD Tahun 2021-2026.

A. Pengukuran dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

Pengukuran kinerja dimaksud untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program / kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi dan Rencana Kerja tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase tingkat capaian dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan penilaian *skala ordinal* sebagai *parameter* keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	85 s/d 100	Baik Sekali
II	70 s/d lebih kecil 85	Baik
III	55 s/d lebih kecil 70	Cukup
IV	Lebih kecil 55	Kurang

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

Evaluasi pengukuran kinerja sasaran strategis terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran sebagai berikut :

- Misi 1** : Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan akuntabel
- Tujuan 1** : Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan
- Sasaran 1** : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022
			Target	Realisasi	
1	Nilai Lakip Perangkat Daerah	poin	80	78,98	98,72%
2	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	45	72,77	161,71%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas dimana penilaian berdasarkan *self assessment* atau penilaian mandiri , dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran pada misi 1, tujuan dan sasaran 1 sudah mencapai target yaitu capaian kinerja untuk nilai LAKIP Perangkat Daerah adalah BB dengan poin 78.98 dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yaitu 72,76 (dari hasil konversi nilai 26,41). Sedangkan penilaian pada tahun 2022 ini dengan *self assessment* atau penilaian mandiri, setidaknya upaya kita pada tahun 2022 sesuai target dan hasil yang didapat dari self assesment (penilaian mandiri) berupa pengisian LKE RB dan kertas kerja Lakip. Adapun faktor pendorong didalam meningkatkan capaian indikator pertama pada sasaran 1 yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal

dan Pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi. Sedangkan untuk factor pendorong didalam peningkatan capaian indikator kedua pada sasaran 1 yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Berperadaban
- Tujuan 2 : Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
- Sasaran 2 : Meningkatnya Ketangguhan Bencana

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja 2021
			Target	Realisasi	
1	Indeks Resiko Bencana	Kelas Risiko	Sedang	Sedang	Sedang (skor 121.23)

Capaian Kinerja indikator sasaran ini didapat dari mengisi kuisioner Peringkat Penilaian Kapasitas Daerah (7 Fokus Prioritas dan 71 Indikator pencapaian) dari BNPB.

Pendekatan teknis perhitungan indeks resiko bencana didasarkan pada Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

Terdapat 3 (Tiga) Indikator sasaran yang merupakan salah satu pendukung untuk menurunkan indeks risiko bencana di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022 (%)
			Target	Realisasi	
1	Persentase Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	%	100	82,65	82,65%

Pada Indikator yang 1 yaitu Persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapatkan informasi kebencanaan dengan target 100% telah terealisasi 82,65%; yang didapat dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. Capaian tersebut signifikan untuk Dokumen KRB tidak terlaksana karena kegagalan dalam perjanjian kerja sama (PKS)/MoU dengan pelaksana/konsultan/pihak ketiga, dengan alasan keterbatasan waktu dalam pengumpulan dan analisa data. dan untuk layanan informasi rawan bencana (1)Telah dilaksanakan sosialisasi Informasi melalui Media Cetak dan Media Elektronik (Leaflet, Stiker, Koran, Online, dan Radio); (2)Telah dilaksanakan sosialisasi kepada kelompok pemuda, kelompok wanita, kelompok pelajar/mahasiswa, kelompok aparatur, kelompok guru, dan kelompok RT/RW; (3)Seluruh Kelurahan yang ada di Kota Cilegon telah melakukan sosialisasi kepada warganya secara mandiri melalui anggaran DPWKEL; (4)Peran serta industri juga aktif melakukan sosialisasi kepada warga di sekitar perusahaannya;

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2022 mencapai target yaitu 82,65 % dalam kategori baik.

Sedangkan untuk realisasi anggaran pada APBD-P TA. 2022 yaitu sebesar Rp. 157.780.980 atau 45,13% dari anggaran sebesar Rp. 349.630.559

No	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022 (%)
			Target	Realisasi	
2	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%	100	90	90%

Indikator kedua adalah persentase masyarakat di wilayah rawan bencana yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan target 100% telah terealisasi 90%, yang didapat dari penjumlahan masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Capaian tersebut signifikan dikarenakan (1)Telah tersedianya Lokasi Evakuasi, Jalur Evakuasi, Zonasi; (2)Telah adanya Peralatan Kebencanaan, Pusdalops, TRC dan Relawan Kebencanaan; (3)Sering dilakukan drill/Simulasi kebencanaan baik di sekolah-sekolah, kelurahan-kelurahan, dan di industri-industri;

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2022 mencapai target yaitu 100 % dalam kategori baik sekali

Untuk realisasi anggaran pada APBD-P TA. 2022 yaitu sebesar Rp. 1.101.673.989 atau 70,16% dari anggaran sebesar RP. 1.570.165.285

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022 (%)
			Target	Realisasi	
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100%

Untuk indikator yang ketiga yaitu persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target 100% telah terealisasi 100%, yang didapat dari penjumlahan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, capaian ini signifikan dikarenakan telah melaksanakan (1) Fungsi komando yang dilaksanakan melalui pengerahan SDM, Peralatan, Logistik dari OPD terkait, (2) Fungsi Koordinasi yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan OPD terkait, instansi vertikal, Lembaga Usaha dll dan (3) Fungsi Pelaksana unsur pelaksana BPBD Kota Cilegon yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan OPD terkait dan instansi vertikal yang ada di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2022 mencapai target yaitu 100 % dalam kategori baik sekali

Untuk realisasi anggaran pada APBD-P TA. 2022 yaitu sebesar Rp. 1.021.135.844 atau 80,23% dari anggaran sebesar Rp. 1.272.797.137

Berikut disampaikan Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target sebagai berikut :

Tabel 3.2
Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Ketercapaian Target	Keterangan
Misi 1 : Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan akuntabel				
Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	2	1 Indikator Mencapai Target	mencapai target
Jumlah Indikator Sasaran		2		
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Berperadaban				
Tujuan 2: Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat				
2	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	3	1 Indikator Mencapai Target	mencapai target
Jumlah Indikator Sasaran		3		
Jumlah Indikator Sasaran		5		

Adapun Rekapitulasi beserta perhitungan ketercapaian indikator sasaran terhadap target Tahun 2022 dapat dilihat dalam **tabel 3.3 berikut ini:**

TABEL 3.3
REKAPITULASI KETERCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TERHADAP TARGET TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Uraian	Cara Perhitungan	s. d Tahun 2022 (dlm Jumlah)		Tahun 2022		Capaian Kinerja 2022 (%)
				Target	Realisasi	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5		8		9
1	Nilai Lakip Perangkat Daerah	poin	Berdasarkan Hasil Penilaian Lakip dari Tim Evaluator	80	78,98	80	78,98	98,72
2	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	Berdasarkan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dari Tim Evaluator	45	72,76	45	72,76	161,71
3	Persentase Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	%	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana dibagi jumlah penduduk di kawasan rawan bencana x 100%	100	82,65	100	82,65	82,65
4	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dibagi jumlah penduduk di kawasan rawan bencana x 100%	100	90	100	90	90
5	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana x 100%	100	100	100	100	100

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

Mengingat BPBD Kota Cilegon baru efektif pada tanggal 26 Januari 2015, sehingga perbandingan kinerja yang disajikan dengan 3 tahun terakhir yaitu, 2019, 2020 dan Tahun 2021 yang berdasarkan indikator pada Renstra sebelumnya, dan untuk capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan renstra Tahun 2021-2026 Berikut ini ditampilkan realisasi kinerja BPBD Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 pada **tabel 3.4** berikut:

Tabel 3.4
PERBANDINGAN REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

NO	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Target (%)	Realisasi	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)			(%)			(%)		%	%	%
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan												
a.	Nilai Lakip Perangkat Daerah	B	CC	C	B	B	B	BB	BB	BB			
b.	Tingkat maturitas SPIP	3	0	0	3	3	3	3	3	3			
2	Meningkatnya pencegahan dampak dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran												
a.	Indeks Risiko Bencana	Sedang (Kelas Risiko)	141,24 (Skor)	Sedang (Kelas Risiko)	Sedang (Kelas Risiko)	128,15 (skor)	Sedang (Kelas Risiko)	Sedang (Kelas Risiko)	121,23 (skor)	Sedang (Kelas Risiko)			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur												

a.	Nilai Lakip Perangkat Daerah										80	78,98	98,72
b.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah										45	72,76	161,71
2	Meningkatnya Ketangguhan Bencana												
a.	Persentase Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan										100	82,65	82,65
b.	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana										100	90	90
c.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										100	100	100

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Renstra 2021-2026

LAKIP harus mempertanggungjawabkan kinerja yang telah diperjanjikan/diterapkan dalam Perjanjian Kinerja dan terkait dengan rencana kinerja yang telah direncanakan dalam Rencana Jangka Menengah (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). BPBD Kota Cilegon yang relatif baru dibentuk dan melanjutkan program dari Badan KesbangLinmas Kota Cilegon telah membuat Renstra Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Sehingga realisasi kinerja Tahun 2022 merupakan capaian kinerja dari target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 pada **tabel 3.5** berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

No	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke						Realisasi Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	79 (poin)	80 (Poin)	81 (Poin)	82 (Poin)	83 (Poin)	85 (Poin)	78,43	78,98	n/a	n/a	n/a	n/a
		Indeks RB Perangkat Daerah	42 (poin)	45 (Poin)	48 (Poin)	50 (Poin)	52 (Poin)	52 (Poin)	38,93	72,77	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82,65%	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	n/a	n/a	n/a	n/a
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a

E. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Beberapa penyebab menurunnya pencapaian target kinerja BPBD Kota Cilegon dari Tahun sebelumnya antara lain:

- a. Dengan kondisi saat ini maka untuk meningkatkan kinerja BPBD dimasa yang akan datang perlu didukung oleh SDM yang memadai
- b. Masih kurang koordinasi dengan SKPD/instansi terkait, sehingga hasil belum maksimal
- c. Lingkup penanganan BPBD terhadap pemahaman bencana kepada masyarakat masih belum menyentuh kepada seluruh sasaran sehingga kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan bencana masih kurang.
- d. Masih belum terjalin komunikasi yang efektif dengan industri baik yang berada di zona I, II maupun III, sehingga masih ada industri yang enggan memberikan data terkait kebencanaan
- e. Keterbatasan alat-alat kebencanaan yang menjadi pendukung utama dalam penanganan bencana

Strategi pemecahan masalah yang ditempuh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2022 yaitu:

- a. Membuat usulan ke BKPP untuk penambahan PNS pada BPBD untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik petugas BPBD maupun OPD/Instansi dan relawan melalui berbagai pelatihan kebencanaan
- b. Melakukan peningkatan koordinasi dengan OPD/Instansi terkait baik melalui pertemuan formal maupun non formal
- c. Memaksimalkan upaya pencegahan bencana terhadap masyarakat dengan Sosialisasi, Informasi dan Edukasi terhadap Bencana.
- d. Menjalani komunikasi dengan industri baik melalui simulasi bersama maupun pertemuan baik formal maupun non formal dan menyarankan ke Pihak industri melalui Zona I, II, III.
- e. Perkuatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dengan tersedianya alat-alat kebencanaan yang memadai

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2022 ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon telah melaksanakan 2 (dua) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 49 (Empat Puluh Sembilan) Sub Kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2022. untuk mencapai 5 (Lima) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2022, penyerapan pembiayaan untuk program kegiatan prioritas dengan anggaran sebesar **Rp. 11.583.181.223,-** dan terealisasi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 10.135.228.373** atau tingkat realisasi anggaran sebesar **87,50%** terlihat bahwa BPBD Kota Cilegon telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya.

G. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat diuraikan dibawah ini.

Program Penanggulangan Bencana

Pada Program ini terdapat 3 (tiga) Indikator untuk keberhasilan Program Penanggulangan Bencana yaitu Persentase Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan (100%), Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (100%), dan Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (100%).

Pada Program Penanggulangan Bencana terdapat 3 (Tiga) Kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan informasi Rawan Bencana kab/Kota, Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana . Kegiatan- kegiatan inilah yang menunjang tercapainya indikator-indikator pada program penanggulangan bencana

Kebijakan umum pengelolaan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan tetap mengacu pada kebijakan umum sesuai yang tertuang dalam RENSTRA BPBD Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Jumlah Pagu Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2022 berdasarkan DPA Perubahan APBD Kota Cilegon tahun 2022 adalah sebesar **Rp.11.583.181.223,-** dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 10.135.228.373,-** atau tingkat realisasi sebesar **87,50%** pada **tabel 3.6** berikut:

Tabel. 3.6

Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		8.390.588.242	7.855.840.060	93,63%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		96.632.436	93.917.780	97,19%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.589.775	3.589.224	99,98%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.508.000	8.504.230	99,96%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.352.715	11.350.787	99,98%
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.999.732	2.999.604	100,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10.833.000	9.532.242	87,99%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.349.996	54.943.571	97,50%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.999.218	2.997.940	99,96%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.072.882.494	4.738.780.402	93,41%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.993.682.494	4.659.581.518	93,31%
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.200.000	64.200.000	100,00%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	15.000.000,00	14.998.884	99,99%
Administrasi BMD pada Perangkat Daerah		18.000.000	18.000.000	100,00%
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000	18.000.000	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6.926.972	5.405.000	78,03%
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.433.000	2.013.000	82,74%
13	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.493.972	1.967.000	78,87%
14	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.000.000	1.425.000	78,03%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		467.410.937	453.573.282	97,04%
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.987.567	9.983.000	99,95%
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.965.066	68.815.066	90,59%
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.504.607	30.503.960	100,00%
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.615.097	105.610.726	94,62%
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.949.800	48.454.400	95,10%
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.916.000	13.955.500	93,56%
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.482.800	3.469.000	99,60%
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.990.000	168.628.000	97,04%
Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		123.449.320	112.568.000	91,19%
23	Pengadaan Mebel	12.318.472	11.240.000	91,25%
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.130.848	101.328.000	91,18%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.109.082.245	2.001.333.768	94,89%
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.00	6.000.000	100,00%
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	241.233.904	198.576.098	82,32%
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.861.848.341	1.796.757.670	96,50%
Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		496.203.838	432.261.828	87,11%
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	367.496.615	305.150.130	83,30%

29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.781.000	24.363.460	49,94%
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.926.223	77.579.638	97,06%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		3.192.592.981	735.005.413	23,02%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		349.630.559	157.780.980	45,13%
31	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	249.631.869	63.434.000	25,41%
32	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	99.998.690	94.346.980	94,35%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1.570.165.285	1.101.673.989	70,15%
33	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0,00%
34	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	574.996.451	512.549.709	89,14%
35	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	139.994.485	0	0,00%
36	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	169.997.627	0	0,00%
37	Pengelolaan Risiko Bencana Kab/Kota	49.992.718	45.233.100	90,48%
38	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	49.997.317	49.112.500	98,23%
39	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	29.998.856	28.188.780	93,97%
40	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	95.201.006	69.377.700	39,22%
41	Penyusunan Rencana Kontijensi	0	0	0,00%
42	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	439.986.918	378.240.600	85,97%
43	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	19.999.907	18.971.600	94,86%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1.272.797.137	1.021.135.844	80,23%
44	Respon Cepat Kejadian Luar biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	25.000.000	17.544.000	70,18%
45	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	804.300.000	639.784.300	79,55%
46	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	30.000.000	23.064.000	76,88%
47	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	384.997.137	316.038.544	82,09%
48	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	8.500.000	8.500.000	100,00%
49	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	20.000.000	16.205.000	81,03%

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Per Sasaran dan Program Pendukung Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin	78,98	98,72%	Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah	8.383.661.270	7.850.435.060	93,55%
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	45 Poin	72,76	161,71%		6.926.972	5.405.000	78,03%
2	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100	82,65%	82,65%	Program Penanggulan Bencana	349.630.559	157.780.980	45,13%
		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100	90%	90%		1.570.165.285	1.101.673.989	70,16%
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100%		1.272.797.137	1.021.135.844	80,23%
Jumlah Total Belanja							11.583.181.223	10.135.228.373	87,50%

Selanjutnya berikut ini Rekapitulasi Anggaran Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 :

Tabel 3.8
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja BPBD Kota Cilegon
Pada APBD-P Tahun Anggaran 2022

<i>URAIAN BELANJA</i>	<i>ANGGARAN (RP)</i>	<i>REALISASI ANGGARAN (RP)</i>	<i>CAPAIAN (%)</i>
BELANJA OPERASI	11.270.965.446	10.022.660.373	88,92%
Belanja Pegawai	5.124.292.494	4.778.241.518	93,25%
Belanja Barang dan Jasa	6.146.672.952	5.244.418.855	85,32%
BELANJA MODAL	312.215.777	112.568.000	36,05%
TOTAL BELANJA DAERAH	11.583.181.223	10.135.228.373	87,50%

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada Tahun Anggaran 2022, sasaran sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 berjumlah 2 (Dua) sasaran dengan 5 (Lima) indikator sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 3 indikator sasaran dengan hasil sebagai berikut :

1. Nilai Lakip Perangkat Daerah mendapat poin 78,98
2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mendapat poin 72,76
3. Persentase Masyarakat Di Wilayah rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan (82,65%)
4. Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (90%)
5. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (100%)

Di lihat dari hasil penilaian terhadap 5 indikator sasaran diatas maka pencapaian sasaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 sudah mencapai target. Namun demikian masih terdapat beberapa perlu penyempurnaan terhadap pemenuhan indikator-indikator sasaran agar BPBD menjadi lebih baik lagi.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik petugas BPBD maupun OPD/Instansi dan relawan melalui berbagai pelatihan kebencanaan
2. Membuat usulan ke BKPP untuk penambahan PNS pada BPBD
3. Memberdayakan Pegawai non PNS untuk diperbantukan di bidang-bidang yang tidak ada staf/pelaksana
4. Melalui Musrenbang BPBD Kota Cilegon mengusulkan penambahan peralatan pendukung, upaya yang lain yaitu membuat Proposal ke BNPB dan BPBD Propinsi Banten untuk mendapatkan bantuan logistik dan peralatan.
5. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan, dalam hal ini melakukan peningkatan koordinasi dengan OPD/Instansi terkait baik melalui pertemuan formal maupun non formal
6. Melakukan peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
7. Perkuatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dengan tersedianya alat-alat kebencanaan yang memadai

Selanjutnya sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatnya Ketangguhan Bencana pada Tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan BNPB yaitu bahwa capaian indeks risiko bencana Kota Cilegon dengan skor 121,23 kelas risiko sedang, Dengan demikian capaian sasaran pada Tahun 2021 sesuai target.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator sasaran yang dicantumkan dalam RENSTRA BPBD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 dapat terlaksana dengan kategori sangat baik dan baik. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, tentunya harus menjadi motivasi bagi BPBD untuk lebih baik lagi kedepan dalam pencapaian indikator kinerja yang sudah ditargetkan.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Teuku Cikditiro No.164
Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon 42416
Telp/Fax. (0254) 7870720 PUSDALOPS PB (0254) 7870720
Email :bpbdccilegon@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 050/Kep-08/Sekret/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BPBD KOTA CILEGON TAHUN 2022
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
CILEGON

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- b. bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kota Cilegon yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD Kota Cilegon.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan : Peraturan Walikota Cilegon Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kota Cilegon Tahun 2022 TA. 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas pokok Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA di atas adalah sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan-bahan, data dan materi yang dibutuhkan dalam kegiatan dimaksud;
 2. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kota Cilegon Tahun 2022
 3. Melaporkan semua hasil kegiatan tim ini kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Cilegon.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas, dibebankan pada APBD Kota Cilegon TA. 2023 pada Pos Anggaran BPBD Kota Cilegon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : C i l e g o n
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala Pelaksana
BPBD Kota Cilegon



Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si
NIP. 19630704 198410 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Cilegon;
3. Inspektur Kota Cilegon;
4. Kepala BPKAD Kota Cilegon;
5. Plt. Kepala BAPPEDA Kota Cilegon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 050/Kep-08/Sekret/2023
Tanggal : 2 Januari 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja BPBD Kota Cilegon Tahun 2022 TA. 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BPBD KOTA CILEGON TAHUN 2022
TA. 2023**

Penanggung Jawab : KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA CILEGON
Ketua : SEKRETARIS BPBD KOTA CILEGON
Sekretaris : KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Anggota : 1. KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA
2. KABID PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
3. KABID SISTEM DASAR DAN INFORMASI BENCANA
4. KASI PENCEGAHAN BENCANA
5. KASI KESIAPSIAGAAN BENCANA
6. KASI KEDARURATAN BENCANA
7. KASI LOGISTIK KEDARURATAN BENCANA
8. KASI SISTEM DASAR BENCANA
9. KASI LAYANAN INFORMASI BENCANA
10. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
11. KASUBAG KEUANGAN

Ditetapkan di : C i l e g o n
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala Pelaksana
BPBD Kota Cilegon



Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si
NIP. 19630704 198410 1 011



**WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 060/kep.639-Bappeda/2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN KINERJA SECARA *REAL-TIME* DAN TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan prosedur kerja bagi aparatur yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk standar operasional prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kinerja secara *Real-Time* dan Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 649);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

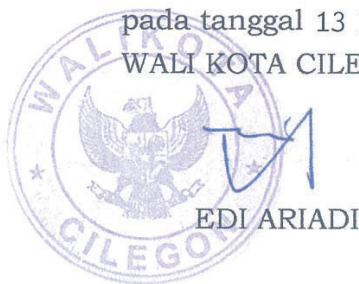
Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kinerja Secara *Real-Time* dan Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Penyusunan Rencana Proses Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - b. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan di lingkup Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Cilegon.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 13 Desember 2019

WALI KOTA CILEGON



Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon;
2. Yth. Inspektur Kota Cilegon;
3. Yth. Kepala Perangkat Daerah se Kota Cilegon.



**WALIKOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 060/Kep.270-ORB/2018

**TENTANG
MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON**

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan Ketentuan dalam dalam huruf D, Lampiran II, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja, serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja, perlu adanya mekanisme yang sama dalam menyusun laporan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 649);
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 3).
7. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cilegon merupakan standarisasi langkah dan/atau tahapan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cilegon.

KEDUA : Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

1. Mekanisme Pengumpulan Data Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
2. Mekanisme Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
3. Mekanisme Penyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah; dan
4. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Tingkat Kota Cilegon.

KETIGA : Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat dilakukan evaluasi dan/atau perubahan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah, yang diserahkan ke Inspektorat dan Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi harus mencantumkan lembar verifikasi dari Bagian pada Sekretariat Daerah yang mengoordinatori Urusan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cilegon.

KETUJUH ...

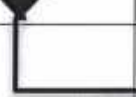
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 19 Maret 2018
Plt. WALI KOTA CILEGON



EDI ARIADI

Lampiran I : KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
 Nomor : 060/ Kep. 270-ORB/ 2018
 Tentang : MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KE NO
	SERETA RIS DINAS	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	PEJABAT FUNGSI NAL UMUM	KEPALA BIDANG	KELENGKAP AN	WAKTU	OUTPUT	
Menugaskan Kepada Kasubag Program dan Keuangan untuk mengumpulkan data kinerja					Agenda Kerja	10 menit	Disposisi	
Menugaskan kepada JFU untuk mengumpulkan data kinerja					Disposisi	10 menit	Disposisi	
Membuat Nota Dinas Permohonan Data Kinerja dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang					Disposisi	30 menit	Nota Dinas	
Membuat laporan data dan analisa capaian kinerja dan menyampaikannya kepada Sekretaris Dinas					Nota Dinas	5 hari	Data dan analisa capaian kinerja	
Menugaskan Kepada Kasubag untuk mengolah Data Kinerja					Data dan analisa capaian kinerja	10 menit	Disposisi	
Menelaah dan Memverifikasi data kinerja. Jika Sesuai akan diteruskan kepada JFU untuk diolah. Jika Tidak Sesuai akan dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki kembali					Data Kinerja dan Disposisi	10 menit	Data Kerja dan Disposisi	
Mengolah Data Kinerja dalam data base capaian kinerja					Data Kinerja dan Disposisi	10 menit	Data Base Capaian Kinerja	

Plt. WALI KOTA CILEGON


 FEDI ARIADI

Lampiran II : KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
 Nomor : 060/ Kep.270-ORB/ 2018
 Tentang : MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			K
	SERETA RIS DINAS	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	PEJABAT FUNGSI NAL UMUM	TIM Penyusun Laporan	Kepala Dinas	KELENGKA PAN	WAKTU	OUTPUT	
Menugaskan kepada Kasubag untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah						Agenda Kerja	10 menit	Disposisi	
Menugaskan kepada JFU untuk mengumpulkan data kinerja dan menyampaikan kepada tim						Disposisi	10 menit	Disposisi	
Mengumpulkan dan menyampaikan data kinerja dari masing-masing bidang kepada tim penyusun Laporan						Nota Dinas	5 Hari	Data Capaian Kinerja	
Menyusun Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah						Data Kerja	15 Hari	Rancangan Laporan	
Menelaah dan mengoreksi Rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Jika Setuju akan diparaf dan diteruskan kepada Sekretaris Dinas. Jika Tidak Setuju, akan dikembalikan kepada Tim Penyusun Laporan untuk diperbaiki						Rancangan Laporan	5 Hari	Rancangan Laporan	
Menelaah dan mengoreksi Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Jika Setuju akan diparaf dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika Tidak Setuju, akan dikembalikan kepada Kasubag Program dan Keuangan untuk diperbaiki						Rancangan Laporan	3 Hari	Rancangan Laporan	
Menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah						Rancangan Laporan	25 menit	Laporan	

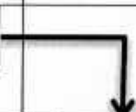
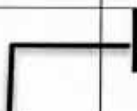
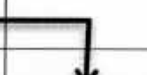
Plt. WALI KOTA CILEGON


 FEDI ARIADI

Lampiran III : KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

Nomor : 060/ Kep.270-ORB/ 2018

Tentang : MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
	SERETARIS DINAS	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	PEJABAT FUNGSIONAL UMUM	Kepala DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
Menugaskan kepada Kasubag untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah					Agenda Kerja	10 menit	Disposisi	
Menugaskan kepada JFU untuk membuat Surat Pengantar dan menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah ditandatangani					Disposisi	10 menit	Disposisi	
Membuat Surat Pengantar dan Menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja					Nota Dinas dan Disposisi	20 menit	Rancangan Surat Pengantar dan Kelengkapan	
Menelaah dan memeriksa Rancangan Surat Pengantar beserta kelengkapannya. Jika Setuju akan diparaf. Jika Tidak Setuju akan di kembalikan kepada JFU untuk diperbaiki					Rancangan Surat Pengantar dan Kelengkapan	20 menit	Rancangan Surat Pengantar dan Kelengkapan	
Menelaah dan memeriksa Rancangan Surat Pengantar beserta kelengkapannya. Jika Setuju akan diparaf dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika Tidak Setuju akan di kembalikan kepada JFU untuk diperbaiki					Rancangan Surat Pengantar dan Kelengkapan	20 Menit	Rancangan Surat Pengantar dan Kelengkapan	
Menandatangani Surat Pengantar					Rancangan Surat Pengantar dan Kelengkapan	10 menit	Surat Pengantar dan Kelengkapan	
Menyampaikan surat pengantar beserta kelengkapannya kepada inspektorat, dan Bagian Organisasi dan RB Setda.					Surat Pengantar dan Kelengkapan	1 hari	Surat Pengantar dan Laporan Kinerja	

Plt. WALI KOTA CILEGON


EDI ARIADI

Lampiran IV : KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
 Nomor : 060/ Kep.270-ORB/ 2018
 Tentang : MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				ASDA	SEKDA	WALI KOTA	MUTU BAKU			KET
		KABAG ORB	KASUBAG ARB	JFU	TIM Penyusun				KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima data kinerja dari instansi di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dan menugaskan kepada Kasubag ARB untuk menyusun Laporan Kinerja Tk. Kota								Data Kerja	5 menit	Disposisi	
2.	Menugaskan kepada JFU untuk membuat database kinerja dan menyerahkan kepada tim penyusun untuk membuat Draft Laporan Kinerja Tk. Kota								Data Kerja	10 menit	Disposisi	
3.	Mengumpulkan dan merekap data kinerja dalam data base kinerja. Selanjutnya diserahkan kepada tim penyusun untuk diolah dan disusun								Data Kerja	5 Hari	Data Kerja	
4.	mengolah, menganalisa, dan menyusun Draft Laporan Kinerja Tk. Kota								Rancangan Laporan	20 Hari	Rancangan Laporan	
5.	memeriksa, menganalisa dan menelaah draft Laporan Kinerja Tk. Kota. Jika Setuju akan diserahkan kepada Kabag ORB untuk diparaf. Jika Tidak, akan dikembalikan untuk diperbaiki								Rancangan Laporan	5 Hari	Rancangan Laporan	
6.	Memeriksa dan menelaah draft Laporan Kinerja Tk. Kota. Jika Setuju akan diparaf dan dilanjutkan kepada asisten. Jika Tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki								Rancangan Laporan	3 Hari	Rancangan Laporan	
7.	Memeriksa dan menelaah draft Laporan Kinerja Tk. Kota. Jika Setuju akan diparaf dan dilanjutkan kepada Sekretaris Daerah. Jika Tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki								Rancangan Laporan	1 Hari	Rancangan Laporan	
8.	menelaah draft Laporan Kinerja Tk. Kota. Jika Setuju akan diparaf dan dilanjutkan kepada Walikota untuk ditandatangani. Jika Tidak, akan dikembalikan untuk diperbaiki								Rancangan Laporan	1 Hari	Rancangan Laporan	
9.	menelaah draft Laporan Kinerja Tk. Kota. Jika Setuju akan ditandatangani, Jika Tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki								Rancangan Laporan	1 Hari	Laporan	

Plt. WALI KOTA CILEGON


 EDLARIADI



**WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 060/Kep.287 -ORB/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Cilegon 2021-2026 serta dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cilegon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 807);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021, Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja pada Lampiran I sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dipergunakan sebagai Pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Wali Kota.
- KETIGA : Indikator Kinerja pada Lampiran II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dipergunakan sebagai Pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 22 Desember 2021
WALI KOTA CILEGON,



HELLDY AGUSTIAN

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Kota Cilegon
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 060/Kep.287 -ORB/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatkan kualitas layanan pemerintahan	Indeks reformasi birokrasi	Poin	Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh kementrian PANRB dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020
2.	Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	Poin	Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan IPM Inkesra (Jika data Publikasi BPS Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1)
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan IPM Inkesra (Jika data Publikasi BPS Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1)
4.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Tingkat kemiskinan	Persen	Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Jika data Publikasi BPS Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1
		Tingkat pengangguran terbuka	Poin	Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Jika Publikasi BPS terkait Sakernas Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1

NO ...

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
5.	Meningkatkan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat	Indeks kebahagiaan	Poin	Sesuai dengan metodologi BPS dalam penghitungan Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial, (Jika data Publikasi BPS Tahun N belum tersedia, maka menggunakan data pada tahun N-1)


WALI KOTA CILEGON,
HELDDY AGUSTIAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 060/Kep.287 -ORB/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026

A. SEKRETARIAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Persentase Progress Capaian Roadmap Reformasi Birokrasi	%	Rata-rata capaian indikator sasaran roadmap Reformasi Birokrasi terhadap Target Akhir Road Map
		Tingkat Kepuasan layanan Keprotokolan (Bagian Protokol)	%	Hasil survey kepuasan kemanfaatan layanan keprotokolan

NO ...

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
		Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa (Bagian Barjas)	Poin	Penilaian aspek kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ (bobot 50 %) dan tingkat kematangan UKPBJ (bobot 50 %)
		Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup Administrasi Tata Pemerintahan	%	Jumlah tindaklanjut hasil monev yang ditindaklanjuti dibagi temuan monev x 100 %
		Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup eksda (eksda)	%	Jumlah tindaklanjut hasil monev yang ditindaklanjuti dibagi temuan monev x 100 %
		Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan lingkup Kesos dan Kesra	%	Jumlah tindaklanjut hasil monev yang ditindaklanjuti dibagi temuan monev x 100 %
		Persentase tindak lanjut hasil monev permasalahan Program (Adpem)	%	Jumlah tindaklanjut hasil monev yang ditindaklanjuti dibagi temuan monev x 100 %
		Rata-Rata Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Hukum (Bagian Hukum dan HAM)	%	Rata-rata dari persentase capaian kinerja pelayanan banhuk ditambah persentase capaian kinerja produk hukum ditambah persentase capaian kinerja dokumentasi produk hukum

B. INSPEKTORAT ...

B. INSPEKTORAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1).
		Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1).
		Indeks Manajemen Risiko	Level	Capaian Penilaian Indeks Penerepan Manajemen Risiko dengan area penilaian dan bobot sebagai berikut : a. Perencanaan (40%); b. Kapabilitas (30%); dan c. Hasil (30%).
		Indeks Kapabilitas APIP	Level	Hasil Capaian Indeks Kapabilitas APIP berdasarkan 6 elemen Penilaian meliputi : 1. Peran dan Layanan APIP; 2. Pengelolaan SDM; 3. Praktik Profesional; 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 5. Budaya dan Hubungan Organisasi; dan 6. Struktur Tata Kelola.

C. SEKRETARIAT ...

D. SEKRETARIAT DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Survey Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Poin	Survey dilakukan kepada anggota DPRD untuk mengetahui persepsi anggota DPRD terhadap kualitas layanan Sekretariat DPRD, Berdasarkan indikator : <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan SDM; - Pelayanan Alat Kelengkapan; - Pelayanan Kesehatan; - Penyediaan Sarana dan Prasarana; - Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan; - Pelayanan Persidangan dan risalah; - Pelayanan Bagian Perundang-undangan dan kajian; dan - Pelayanan bagian Keuangan.

E. BADAN ...

D. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Perencanaan	%	Persentase hasil keselarasan, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan kota
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	Persentase hasil keselarasan, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan sektoral
2.	Meningkatnya Budaya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	Indeks Inovasi Daerah dinilai setiap tahun oleh Kemendagri yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri

E. BADAN

E. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Pengelolaan Keuangan	Poin	Hasil Pengukuran atas 6 Dimensi Pengelolaan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indek Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Meningkatnya pendapatan daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun n terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun n-1 Formulasi = $((X_n - X_{n-1}) / X_{n-1}) \times 100\%$ Keterangan : X_n = Realisasi PAD Tahun n X_{n-1} = Realisasi PAD Tahun (n-1)

F. BADAN ...

F. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Poin	Indeks Merit System : Akumulasi atau jumlah dari skor/nilai dari tim penilai mandiri yang telah diverifikasi oleh KASN, dari aspek-aspek di bawah ini, sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 : <ul style="list-style-type: none"> - perencanaan kebutuhan (10%) - pengadaan (10%) - pengembangan karir (30%) - promosi dan mutasi (10%) - manajemen kinerja (20%) - penggajian, penghargaan dan disiplin (10%) - perlindungan dan pelayanan (4%) - sistem informasi (6%)
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator (tata cara detail berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019))

G. BADAN ...

G. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Mewujudkan kondusivitas wilayah, kerukunan umat beragama dan nilai-nilai luhur keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	Berdasarkan hasil penilaian dari BPS (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahu n-1)

H. BADAN ...

H. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya ketangguhan bencana	Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Informasi Kebencanaan	%	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana dibagi jumlah penduduk di kawasan rawan bencana x 100%
		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana yang mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%	Jumlah Aparatur yang menangani urusan bencana ditambah jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dibagi jumlah aparatur yang menangani urusan bencana dan jumlah penduduk di kawasan rawan bencana x 100%
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana x 100%

I. DINAS ...

I. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya Kualitas Penataan ruang, dan infrastuktur kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses air Minum yang Layak dan Aman	Persen	Jumlah Rumah tangga Yang mendapat akses air minum (jaringan perpipaan ditambah bukan jaringan perpipaan ditambah mata air terlindungi ditambah sumber lainnya (sungai, waduk,irigasi dan tanki) dibagi Jumlah total rumah tangga dikali Seratus persen.
		Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah dibagi dengan jumlah total rumah tangga di kota Cilegon dikali seratus persen
		Rasio Kepatuhan Perizinan Bangunan Gedung	Persen	Jumlah bangunan yang memiliki Perizinan Bangunan Gedung dibagi Jumlah bangunan yang ada di kota cilegon dikali Seratus persen
		Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat (operator, teknisi, analis) dibagi Jumlah tenaga kerja konstruksi yang ada wilayah kota cilegon dikali Seratus persen.
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	Luas pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukan dibagi Luas total lahan kawasan budidaya dikali Seratus persen.
		Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	Panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (km) (termasuk bangunan pelengkap) dibagi panjang seluruh jalan kota (km) dikali Seratus persen.
3.	Mewujudkan kota yang bebas banjir	Persentase Penanganan Banjir	Persen	Luas banjir atau genangan yang ditangani dibagi Luas seluruh banjir atau genangan (SK) dikali Seratus persen.

J. DINAS ...

J. DINAS PENDIDIKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen Perencanaan Kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, Pelaporan Kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Terwujudnya kualitas pendidikan yang merata	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Pendidikan	Persen	$(APM \text{ kesetaraan} / \text{target APM kesetaraan} + APM \text{ PAUD} / \text{target APM PAUD} + APM \text{ SD} / \text{target SD} + APM \text{ SMP} / \text{target APM SMP}) / 4 \times 100\%$
		Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah kurikulum muatan lokal pada jenjang SD ditambah jenjang SMP ditambah jenjang PAUD
		Proporsi Pendidik Yang telah lulus Sertifikasi	Persen	$\text{Jumlah pendidik jenjang PAUD, SD dan SMP yang telah bersertifikat sebagai pendidik} / \text{jumlah seluruh pendidik jenjang PAUD, SD dan SMP} \times 100\%$
		Persentase Lembaga Pendidikan yang Memiliki Izin	Persen	$\text{Jumlah sekolah PAUD, SD dan SMP yang memiliki izin} / \text{jumlah seluruh sekolah PAUD, SD dan SMP} \times 100\%$
		Tingkat Pengenalan Bahasa Daerah pada Masyarakat Usia Sekolah	Persen	$(\text{Jumlah siswa PAUD, SD dan SMP yang belajar bahasa daerah} / \text{jumlah penduduk usia 5 - 15 tahun}) \times 100\%$

K. DINAS ...

K. DINAS KESEHATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Puskesmas dan RSUD)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) Pelayanan Puskesmas dan RSUD yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan individu	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	Persen	Jumlah total nilai keseluruhan kinerja SPM Bidang Kesehatan di bagi Jumlah indikator SPM Bidang Kesehatan dikali 100 Persen

L. DINAS ...

L. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kearsipan	Poin	Indeks Kearsipan adalah Nilai yang diperoleh dari hasil Audit Kearsipan yang dilakukan oleh Lembaga Nasional Pusat (ANRI) melali Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya kompetensi masyarakat literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	data dan informasi tentang tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif atas unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan budaya literasi masyarakat.

M. DINAS ...

M. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	Persen	$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$ <p>Ket :</p> <p>Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah</p> <p>Xt = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu</p> <p>X(t-1) = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya</p>
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	<p>Memakai Perhitungan IKLH Kota =</p> $(IKA \times 37,6\%) + (IKU \times 40,5\%) + (IKTL \times 21,9\%)$ <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

N. DINAS ...

N. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n 1)
2.	Meningkatnya kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani	Persen	<p>Persentase penanganan pengaduan yang merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap anak yang diajukan korban berada pada rentang 0 s.d. 100</p> <p><i>Jumlah Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota (UPTD PPA) dibagi jumlah anak yang mengalami korban kekerasan yang dilaporkan ke instansi kota dikali seratus persen</i></p>
		Tingkat Pertumbuhan Alamiah Penduduk	Persen	<p>Pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian</p> <p><i>Jumlah Kelahiran Hidup dikurangi jumlah kematian penduduk sepanjang tahun n dibagi jumlah penduduk pada awal tahun n</i></p>
		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Per 100.000 Penduduk perempuan	<p>Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan Per 100.000 Jumlah Penduduk Perempuan</p> <p><i>Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi Jumlah seluruh Penduduk Perempuan dikali Seratus Ribu</i></p>
		Persentase Pelaku Usaha Perempuan yang Meningkatkan Skala Usahanya	Persen	<p>Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha perempuan yang meningkat skala usahanya</p> <p><i>Jumlah pelaku usaha yang dibina di Kota Cilegon dibagi jumlah pelaku usaha perempuan yang ada dikali Seratus Persen</i></p>

O. DINAS ...

O. DINAS SOSIAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat	Persentase Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persen	Jumlah persentase jenis PPKS yang ditangani dibagi jumlah jenis PPKS Kota yang ada dikali seratus persen $\text{Formula} = (\sum Xi) / n$ $Xi : \text{Persentase PPKS jenis ke } i \text{ yang ditangani}$ $n : \text{jumlah jenis PPKS}$ $Xi = (Ri/Si) \times 100\%$ $Ri : \text{jumlah PPKS jenis ke-} i \text{ yang ditangani}$ $Si : \text{jumlah PPKS Kota jenis ke-} i \text{ yang ada}$
3.	Meningkatnya ketangguhan bencana	Persentase Korban Bencana Alam/sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	Persen	X = Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Jumlah Korban Bencana alam dan sosial di daerah kota yang membutuhkan kebutuhan dasar/Perlindungan Sosial Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Rata-Rata Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Sesuai Standar	Persen	Rata-rata persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RT, RW) yang Aktif (berdasarkan instrumen tertentu) dibagi Jumlah seluruh Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RT, RW)

P. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	Persen	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani dibagi Luas Total Kawasan Kumuh dikali seratus persen
3.	Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman	Persentase Capaian Penyediaan PSU Permukiman	Persen	Rata-rata persentase Rukun Warga (RW) yang difasilitasi oleh prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman.
4.	Penyediaan Rehabilitasi Perumahan Terdampak Bencana	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	Jumlah Rumah tidak Layak Huni korban bencana yang ditangani (direhab) dibagi jumlah total Rumah Tidak Layak Huni Terkena Bencana dikali seratus persen

Q. DINAS ...

Q. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	%	$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$ <p>Ket : Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah Xt = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu X (t – 1) = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya</p>
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Point	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya Stabilitas Pangan	Tingkat stabilitas harga pangan	%	$CV = SD/M \times 100\%$ <p>SD : standar deviasi harga pangan M : rata-rata harga pangan</p> $STDEV = \sqrt{\frac{n \sum P_i^2 - \left(\sum P_i \right)^2}{n(n-1)}}$

R. DINAS ...

R. DINAS PERHUBUNGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Transportasi Kota	Rasio Konektivitas Wilayah	Persen	<p>Konektifitas wilayah yang diukur dari jumlah angkot yang tersedia dari trayek yang ada dibandingkan dengan jumlah angkot yang melayani seluruh trayek yang dibutuhkan di Kota Cilegon.</p> $\frac{\text{Jumlah angkot yang aktif melayani trayek yang ada pada kabupaten/kota}}{\text{Jumlah angkot yang melayani seluruh trayek yang dibutuhkan pada kabupaten/kota}} \times 100\%$
		Kinerja Lalu Lintas Jalan	Poin	<p>Tingkat pelayanan ruas jalan kota, yang diklasifikasikan menjadi 6 , yaitu : Tingkat Pelayanan A sampai dengan Tingkat Pelayanan F</p> $= \frac{\text{volume lalu-lintas}}{\text{kapasitas jalan}}$

S. DINAS

S. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya Kondusifitas Wilayah	Rata Rata Pencapaian Kinerja SPM Trantibum linmas	Persen	<p>Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan perda sesuai mutu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penegakan Perda sesuai SOP; - Pelaksanaan penegakan perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar; dan - Pelaksanaan Penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai standar

T. DINAS ...

T. DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI SANDI DAN STATISTIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kualitas pemanfaatan data dan teknologi informasi	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Poin	Berdasarkan hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Kabupaten/Kota Oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP)
		Indeks SPBE	Poin	Proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Ada 3 domain yang dinilai yaitu : Kebijakan, tata kelola dan layanan yang terdiri dari 7 aspek yaitu : kebijakan tata kelola, kebijakan layanan, kelembagaan, strategi dan perencanaan, TIK, layanan administrasi pemerintahan, layanan publik
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Statistik Sektoral	Persen	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Persentase Layanan Keamanan Informasi	Persen	Jumlah layanan keamanan informasi dibagi dengan jumlah penerapan Standar manajemen Keamanan Informasi dikalikan 100%

U. DINAS ...

U. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya tata kelola Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk yaitu Cakupan KK, KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Pindah Keluar Kota Cilegon, Surat Keterangan Tempat Tinggal
		Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	Persen	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil yaitu cakupan akta kelahiran usia 0-17 tahun, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian
		Persentase Validitas Data Kependudukan	Persen	Jumlah Data bermasalah yang Terverifikasi dibagi jumlah Data Bermasalah
		Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	Persen	Jumlah jenis data profil yang tersedia dibagi dengan jumlah jenis data yang seharusnya tersedia

V. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	Persen	$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$ <p>Ket : Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah Xt = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu X (t – 1) = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya</p>
2.	Meningkatnya kualitas penanganan bencana kebakaran dan penyelamatan	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi dalam tingkat waktu tanggap	Persen	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun n dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibagi Jumlah kejadian kebakaran dikalikan 100%
		Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi oleh BALAKAR dalam tingkat waktu tanggap	Persen	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun n dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh BALAKAR dibagi Jumlah kejadian kebakaran dikalikan 100%
		Persentase layanan penyelamatan, dan evakuasi kejadian non kebakaran	Persen	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang terlayani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibagi jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi dikalikan 100%

W. DINAS ...

W. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Destinasi Pariwisata	Persentase realisasi destinasi wisata	Persen	Progres pembangunan destinasi pariwisata dihitung secara akumulatif : - Tahun ke-1 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 17% - Tahun ke-2 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 58 % - Tahun ke-3 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 71% - Tahun ke-4 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 80% - Tahun ke-5 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 100%
		Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun berjalan.
		Persentase SDM kepariwisataan ekonomi kreatif yang bersertifikat	Persen	(Jumlah sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat dibagi jumlah sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada) x 100%
		Jumlah even kebudayaan yang diselenggarakan	Even	Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan pada tahun berjalan
		Persentase kelompok pelaku kesenian tradisional yang dibina	Persen	(Jumlah kelompok pelaku kesenian tradisional yang dibina dibagi Jumlah kelompok pelaku kesenian tradisional yang ditargetkan ditahun n) x 100%
		Persentase kajian sejarah yang dilakukan	Persen	(Jumlah kajian sejarah yang dilakukan dibagi Jumlah kesejarahan yang ditargetkan ditahun n) x 100%
		Persentase penetapan cagar budaya	Persen	(Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dalam SK dibagi Jumlah cagar budaya yang dikaji) x 100%
		Progres pembangunan museum Daerah	Persen	Progres pembangunan museum daerah dihitung secara akumulatif : - Tahun ke-1 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 10% - Tahun ke-2 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 20 % - Tahun ke-3 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 60% - Tahun ke-4 asumsi pembobotan progres pembangunan sebesar 100%

X. DINAS ...

X. DINAS KOPERASI DAN UKM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi menjadi wirausaha dibagi jumlah usaha mikro yang difasilitasi dikali seratus persen

Y. DINAS ...

Y. DINAS TENAGA KERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60 %, hasil 40 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi	Persen	$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$ <p>Ket :</p> <p>Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah</p> <p>Xt = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu</p> <p>X(t-1) = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya</p>
2.	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja	Persen	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan/magang dibagi Jumlah pencari kerja yang terdaftar

Z. DINAS ...

Z. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%, hasil 40% (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Pertumbuhan Realisasi Retribusi	Persen	$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$ <p>Ket : Gx = Laju pertumbuhan Retribusi Daerah Xt = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Tertentu X(t-1) = Realisasi Retribusi Daerah pada tahun Sebelumnya</p>
2.	Meningkatnya peran perindustrian terhadap perluasan lapangan kerja	Persentase terselesaikannya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persen	Realisasi rencana pembangunan industry kota (RPIK) tahun n dibagi Target pembangunan tahun n dikali seratus persen
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan Industri kecil menengah	Persen	Jumlah Industri kecil menengah yang memiliki kesesuaian dokumen ijin usaha berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan dibagi jumlah industri kecil menengah yang diterbitkan ijin usaha dikali seratus persen.
		Persentase IKM yang terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n yang terdata dalam SIINAS dibagi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun n

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
3.	Meningkatnya Fasilitas Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat yang Sesuai Standar	Persen	Rata-Rata progres pasar rakyat yang direvitalisasi untuk ber-SNI
		Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan / Jumlah pelaku usaha di Kota Cilegon x 100% (jml pelaku usaha:toko modern+swalayan+pelaku usaha yg memiliki TDG)
4.	Terwujudnya stabilitas harga bahan pokok	Tingkat stabilitas harga bahan pokok	Persen	<p>Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok (10 komoditas diluar beras).</p> <p>Formula : $(CV1 + CV2 + CV3 + \dots + CV10)/10$ $CVi = SDi / Mi \times 100\%$</p> <p>CV : koefisien variasi SD : standar deviasi M : mean/rata-rata I : komoditas ke-i , i = 1,2,3,....,10</p>

AA.DINAS ...

AA. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%, hasil 40% (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya investasi daerah	Realisasi Investasi	Triliun	Realisasi Investasi PMA + Realisasi PMDN Pada Tahun n (dalam Rupiah) Ket. Data rilis dari BKPM

BB. DINAS ...

BB. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%, hasil 40% (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	$\frac{\text{Jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) yang berwirausaha}}{\text{Jumlah pemuda yang ada di kota}} \times 100\%$ <p>Ket.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definisi pemuda Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; - Data jumlah pemuda wirausaha dari perangkat daerah yang membidangi Usaha Mikro Kecil; dan <p>Data jumlah pemuda dari perangkat daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil.</p>
		Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100\%$
		Tingkat Prestasi Olahraga	Persen	$\frac{\text{Jumlah jenis pertandingan olahraga yang berprestasi di tingkat Provins}}{\text{Jumlah jenis pertandingan olahraga yang diikuti di tingkat Provinsi}} \times 100\%$
		Persentase Anggota Pramuka yang Aktif	Persen	$\frac{\text{Jumlah anggota pramuka yang aktif}}{\text{Jumlah anggota pramuka yang terdaftar}} \times 100\%$

CC. KECAMATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%, hasil 40% (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	Nilai lakip yang dinilai setiap tahun oleh APIP dengan komponen perencanaan kinerja 30 %, pengukuran kinerja 25 %, pelaporan kinerja 15 % dan Evaluasi Internal 10 % dan Capaian Kinerja 20 % (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	Poin	Berdasarkan hasil penilaian (IKM) yang dilakukan oleh Surveyor dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)
2.	Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan	Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara	Persen	Rumus = $\frac{X}{Y} \times 100\%$ X= Jumlah peserta yang mendapatkan nilai post test ≥ 70 dari nilai maksimal 100 (satuan nya : orang) pada kegiatan sosialisasi/bintek tentang ideologi dan wasbang, karakter $\frac{\text{Jumlah peserta yang mendapatkan nilai post test } \geq 70}{\text{Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi/bintek}} \times 100\%$ Y = Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi/bintek Tentang ideologi dan wasbang, karakter bangsa dan bela negara
		Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	Persen	Rumus = $\frac{X}{Y} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah gangguan trantibum yang dapat ditangani (kasus)}}{\text{Jumlah gangguan trantibum yang terjadi (kasus)}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	Rumus = $\frac{\sum Xi}{n} \times 100\%$ Xi = Jumlah swadaya masyarakat di kelurahan baik terkait fisik ataupun non fisik di tahun ybs (Rp) terhadap total anggaran dana lingkungan (Rp) $\frac{\text{Jumlah swadaya masyarakat di kelurahan baik terkait fisik ataupun non fisik di tahun ybs (Rp)}}{\text{Jumlah swadaya masyarakat di kelurahan baik terkait fisik ataupun non fisik di tahun ybs (Rp)}} \times 100\%$ n = Kelurahan

WALI KOTA CILEGON

HELLDY AGUSTIAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA CILEGON

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. HELLDY AGUSTIAN, SE., SH., MH.

Jabatan : WALIKOTA CILEGON

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

H. HELLDY AGUSTIAN, SE., SH., MH.

Cilegon, 5 Januari 2022


Pihak Pertama,

Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si

NIP: 196307041984101011

SATUAN KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	80
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	45
2	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	%	100
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%	100
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100

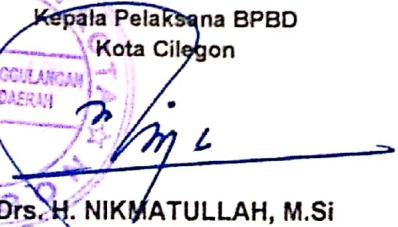
Urusan / Program

Anggaran

A	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	11.343.808.787,00
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	8.316.324.018,00
2.	Program Penanggulangan Bencana	3.027.484.769,00
Total Jumlah Anggaran : Rp.		11.343.808.787,00


 Walikota

H. HELLDY AGUSTIAN, SE., SH., MH.


 Kepala Pelaksana BPBD
 Kota Cilegon

Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si

NIP: 196307041984101011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA CILEGON

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. HELLDY AGUSTIAN, SE., SH., MH.

Jabatan : WALIKOTA CILEGON

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

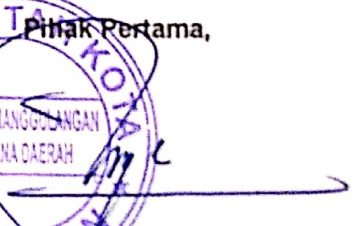
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



H. HELLDY AGUSTIAN, SE., SH., MH.

Cilegon, Oktober 2022
Pihak Pertama,


Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si
NIP: 196307041984101011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	80
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	45
2	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	%	100
		Persentase Masyarakat Di Wilayah Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	%	100
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100

Urusan / Program

Anggaran

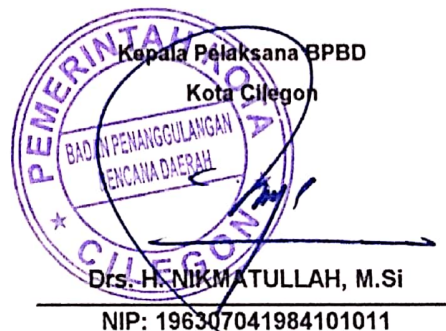
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana

8.390.588.242,00

3.192.592.981,00

Total Jumlah Anggaran : Rp. 11.583.181.223,00


Walikota
H. HELLDY AGUSTIAN, SE., SH., MH.


Kepala Pelaksana BPBD
Kota Cilegon
Drs. H. NIKMATULLAH, M.Si
NIP: 196307041984101011

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BPBD KOTA CILEGON TAHUN 2021-2026**

KODE (RENSTRA)	TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	KODE (RENSTRA)												
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)	Kondisi Akhir RPJMD			
1	2	3		4	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	6
1.05.0.00.0.00.04.00	1.05.0.00.0.00.04.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					10,594,285,257		12,053,473,853		11,157,377,759		11,121,715,324		11,856,536,648		67,365,614,768	10,582,225,927
T1.1	T1.1 Peningkatan layanan pemerintahan					8,174,081,989		8,493,270,585		8,827,174,491		9,176,512,056		9,361,333,380		51,755,772,613	7,723,400,112
T1.1.1		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	62,97 (B)	71,2 (BB)		75,3 (BB)		78 (BB)		82,2 (A)		84,2 (A)		84,2 (A)		7,723,400,112
S1.1.1	S1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas					8,174,081,989		8,493,270,585		8,827,174,491		9,176,512,056		9,361,333,380		51,755,772,613	7,723,400,112
0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.1		Nilai Lakip Perangkat Daerah	poin	79	80		81		82		83		85		85		7,723,400,112
0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.2		Indeks RB Perangkat Daerah	poin	42	45		48		50		52		52		52		-
0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN					8,174,081,989		8,493,270,585		8,827,174,491		9,176,512,056		9,361,333,380		51,755,772,613	7,723,400,112
0.00.01.1.05.0.00.0.00.04.00.1		Nilai Lakip Perangkat Daerah	poin	79	80	8,167,081,989	81	8,486,270,585	82	8,820,174,491	83	9,169,512,056	85	9,354,333,380	85	51,720,772,613	7,723,400,112
0.00.01.2.01.0.00.0.1.1.05.0.00.0.00.04.00.1	0.00.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran,					25,496,732		25,496,732		25,496,732		25,496,732		25,496,732		180,269,046	52,785,386
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	25,496,732	100	25,496,732	100	25,496,732	100	25,496,732	100	25,496,732	100	180,269,046	52,785,386
0.00.01.2.01.011.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen					2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000		20,895,290	8,395,290
1893		Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	dokumen	3	3	2,500,000	3	2,500,000	3	2,500,000	3	2,500,000	3	2,500,000	3	20,895,290	8,395,290
0.00.01.2.01.021.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan					2,498,000		2,498,000		2,498,000		2,498,000		2,498,000		14,988,000	2,498,000
1894		Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	dokumen	1	1	2,498,000	1	2,498,000	1	2,498,000	1	2,498,000	1	2,498,000	1	14,988,000	2,498,000
0.00.01.2.01.031.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan					2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		12,000,000	2,000,000
1895		Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	dokumen	1	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	12,000,000	2,000,000
0.00.01.2.01.041.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-					2,999,732		2,999,732		2,999,732		2,999,732		2,999,732		17,998,392	2,999,732
1896		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	dokumen	1	1	2,999,732	1	2,999,732	1	2,999,732	1	2,999,732	1	2,999,732	1	17,998,392	2,999,732
0.00.01.2.01.051.05.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan					2,499,000		2,499,000		2,499,000		2,499,000		2,499,000		14,994,000	2,499,000

1897		Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang disusun	dokumen	1	1	2,499,000	1	2,499,000	1	2,499,000	1	2,499,000	1	2,499,000	1	14,994,000	2,499,000
0.00.01.2.01.061.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan					10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		75,897,624	25,897,624
1898		Jumlah DokumenCapaian Kinerja dan	dokumen	3	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	75,897,624	25,897,624
0.00.01.2.01.071.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		23,495,740	8,495,740
1899		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Data	dokumen	2	2	3,000,000	2	3,000,000	2	3,000,000	2	3,000,000	2	3,000,000	2	23,495,740	8,495,740
0.00.01.2.02.0.00.0 1.1.05.0.00.0.00.04 .00.1	0.00.01.2.02 Administrasi Keuangan					5,645,697,474		5,836,355,185		6,035,301,662		6,242,933,926		6,278,964,685		35,186,356,867	5,147,103,935
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	5,645,697,474	100	5,836,355,185	100	6,035,301,662	100	6,242,933,926	100	6,278,964,685	100	35,186,356,867	5,147,103,935
0.00.01.2.02.011.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5,590,467,560		5,781,125,271		5,980,071,748		6,187,704,012		6,223,734,771		34,854,977,383	5,091,874,021
1900		Jumlah orang bulan ASN yang mendapat gaji dan	OB	12	12	5,590,467,560	12	5,781,125,271	12	5,980,071,748	12	6,187,704,012	12	6,223,734,771	12	34,854,977,383	5,091,874,021
0.00.01.2.02.031.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan					47,160,000		47,160,000		47,160,000		47,160,000		47,160,000		282,960,000	47,160,000
1901		Jumlah PPK,Bendahara Pengeluaran,Pemb	org/bulan	12	12	47,160,000	12	47,160,000	12	47,160,000	12	47,160,000	12	47,160,000	12	282,960,000	47,160,000
0.00.01.2.02.071.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan					8,069,914		8,069,914		8,069,914		8,069,914		8,069,914		48,419,484	8,069,914
1902		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun (Laporan	dokumen	3	3	8,069,914	3	8,069,914	3	8,069,914	3	8,069,914	3	8,069,914	3	48,419,484	8,069,914
0.00.01.2.03.0.00.0 1.1.05.0.00.0.00.04 .00.1	0.00.01.2.03 Administrasi Barang Milik					18,000,000		18,000,000		18,000,000		18,000,000		18,000,000		108,000,000	18,000,000
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	18,000,000	100	18,000,000	100	18,000,000	100	18,000,000	100	18,000,000	100	108,000,000	18,000,000
0.00.01.2.03.061.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik					18,000,000		18,000,000		18,000,000		18,000,000		18,000,000		108,000,000	18,000,000
1903		Jumlah Pengurus Barang dan Pembantu	OB	12	12	18,000,000	12	18,000,000	12	18,000,000	12	18,000,000	12	18,000,000	12	108,000,000	18,000,000
1904		Jumlah Pengurus Barang dan Pembantu	org/bulan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
0.00.01.2.06.0.00.0 1.1.05.0.00.0.00.04 .00.1	0.00.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat					430,617,200		349,269,285		401,547,499		351,069,285		381,576,773		2,442,829,789	528,749,747
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	430,617,200	100	349,269,285	100	401,547,499	100	351,069,285	100	381,576,773	100	2,442,829,789	528,749,747
0.00.01.2.06.011.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.06.01 Penyediaan Komponen					10,000,000		9,226,498		9,226,498		9,226,498		9,226,498		56,132,490	9,226,498
1908		Jumlah komponen listrik yang disediakan	bulan	12	12	10,000,000	12	9,226,498	12	9,226,498	12	9,226,498	12	9,226,498	12	56,132,490	9,226,498
0.00.01.2.06.021.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan					89,042,787		88,042,787		89,842,787		89,842,787		89,842,787		536,456,722	89,842,787

1909		Jumlah peringatan hari-hari besar yang difasilitasi	kegiatan	3	3	8,000,000	3	7,000,000	3	8,800,000	3	8,800,000	3	8,800,000	3	50,200,000	8,800,000
1910		Jumlah Alat Tulis kantor yang disediakan	jenis	25	25	81,042,787	25	81,042,787	25	81,042,787	25	81,042,787	25	81,042,787	25	486,256,722	81,042,787
0.00.01.2.06.031.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah					30,507,488		10,000,000		25,000,000		10,000,000		30,507,488		136,522,464	30,507,488
1911		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	9	9	30,507,488	9	10,000,000	9	25,000,000	9	10,000,000	9	30,507,488	9	136,522,464	30,507,488
0.00.01.2.06.041.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					111,616,925		100,000,000		104,978,214		100,000,000		110,000,000		666,388,113	139,792,974
1912		Jumlah Penyediaan Kebutuhan	bulan	12	12	111,616,925	12	100,000,000	12	104,978,214	12	100,000,000	12	110,000,000	12	666,388,113	139,792,974
0.00.01.2.06.051.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak					50,950,000		25,000,000		50,000,000		25,000,000		25,000,000		226,900,000	50,950,000
1913		Jenis barang cetakan dan pengadaan	jenis	8	8	50,950,000	8	25,000,000	8	50,000,000	8	25,000,000	8	25,000,000	8	226,900,000	50,950,000
0.00.01.2.06.061.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan					15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		103,776,000	28,776,000
1914		Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan	jenis	6	6	15,000,000	6	15,000,000	6	15,000,000	6	15,000,000	6	15,000,000	6	103,776,000	28,776,000
0.00.01.2.06.081.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu					3,500,000		2,000,000		7,500,000		2,000,000		2,000,000		24,840,000	7,840,000
1915		Jumlah penyediaan makan dan minum	bulan	12	12	3,500,000	12	2,000,000	12	7,500,000	12	2,000,000	12	2,000,000	12	24,840,000	7,840,000
0.00.01.2.06.091.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi					120,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		691,814,000	171,814,000
1916		Jumlah penyediaan akomodasi	bulan	12	12	120,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	691,814,000	171,814,000
0.00.01.2.07.0.00.0 1.1.05.0.00.0.00.04.00.1	0.00.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah					27,406,359		15,000,000		50,000,000		25,272,625		35,000,000		195,993,136	43,314,152
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	27,406,359	100	15,000,000	100	50,000,000	100	25,272,625	100	35,000,000	100	195,993,136	43,314,152
0.00.01.2.07.051.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.07.05 Pengadaan Mebel					12,406,359		-		15,000,000		10,272,625		15,000,000		65,085,343	12,406,359
1917		Jumlah mebel yang tersedia	unit	10	10	12,406,359	10	-	10	15,000,000	10	10,272,625	10	15,000,000	10	65,085,343	12,406,359
0.00.01.2.07.061.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan					15,000,000		15,000,000		35,000,000		15,000,000		20,000,000		130,907,793	30,907,793
1918		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit	3	3	15,000,000	3	15,000,000	3	35,000,000	3	15,000,000	3	20,000,000	3	130,907,793	30,907,793
0.00.01.2.08.0.00.0 1.1.05.0.00.0.00.04.00.1	0.00.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					1,525,285,023		1,786,960,287		1,786,960,287		2,022,160,287		2,022,160,287		10,613,931,066	1,470,404,895
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	1,525,285,023	100	1,786,960,287	100	1,786,960,287	100	2,022,160,287	100	2,022,160,287	100	10,613,931,066	1,470,404,895
0.00.01.2.08.011.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		36,000,000	6,000,000

1919		Jumlah materi yang disediakan	lembar	1250	1250	6,000,000	1250	6,000,000	1250	6,000,000	1250	6,000,000	1250	6,000,000	1250	36,000,000	6,000,000
0.00.01.2.08.021.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,					240,245,023		240,245,023		240,245,023		240,245,023		240,245,023		1,441,470,138	240,245,023
1920		Jumlah jasa komunikasi (telp, Internet), jasa	bulan	12	12	240,245,023	12	240,245,023	12	240,245,023	12	240,245,023	12	240,245,023	12	1,441,470,138	240,245,023
0.00.01.2.08.041.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum					1,279,040,000		1,540,715,264		1,540,715,264		1,775,915,264		1,775,915,264		9,136,460,928	1,224,159,872
1921		Jumlah Jasa pelayanan umum kantor yang	bulan	12	12	1,279,040,000	12	1,540,715,264	12	1,540,715,264	12	1,775,915,264	12	1,775,915,264	12	9,136,460,928	1,224,159,872
0.00.01.2.09.0.00.0 1.1.05.0.00.0.00.04 .00.1	0.00.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik					494,579,201		455,189,096		502,868,311		484,579,201		593,134,903		2,993,392,709	463,041,997
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	494,579,201	100	455,189,096	100	502,868,311	100	484,579,201	100	593,134,903	100	2,993,392,709	463,041,997
0.00.01.2.09.041.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.09.04.01 Jasa Pemeliharaan,					365,782,201		365,782,201		384,071,311		365,782,201		384,071,311		2,231,271,426	365,782,201
1922		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	unit	24	24	365,782,201	24	365,782,201	24	384,071,311	24	365,782,201	24	384,071,311	24	2,231,271,426	365,782,201
0.00.01.2.09.061.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan					48,797,000		48,797,000		48,797,000		48,797,000		48,797,000		292,782,000	48,797,000
1923		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jenis	5	5	48,797,000	5	48,797,000	5	48,797,000	5	48,797,000	5	48,797,000	5	292,782,000	48,797,000
0.00.01.2.09.091.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung					80,000,000		40,609,895		70,000,000		70,000,000		160,266,592		469,339,283	48,462,796
1924		Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	unit	1	1	80,000,000	1	40,609,895	1	70,000,000	1	70,000,000	1	160,266,592	1	469,339,283	48,462,796
0.00.01.1.05.0.00.0 0.04.00.2		Indeks RB Perangkat Daerah	point	42	45	7,000,000	48	7,000,000	50	7,000,000	52	7,000,000	52	7,000,000	52	35,000,000	-
0.00.01.2.05.0.00.0 1.1.05.0.00.0.00.04 .00.2	0.00.01.2.05 Administrasi Kepegawaian					7,000,000		7,000,000		7,000,000		7,000,000		7,000,000		35,000,000	-
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	35,000,000	-
0.00.01.2.05.031.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan					2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000		12,500,000	-
1905		Jumlah laporan pendataan dan pengolahan	dok	0	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	12,500,000	-
0.00.01.2.05.041.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan					2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000		2,500,000		12,500,000	-
1906		Jumlah pegawai yang mengelola Sistem Informasi	org	0	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	12,500,000	-
0.00.01.2.05.051.0 5.0.00.0.00.04.00	0.00.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan					2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		10,000,000	-
1907		Jumlah Laporan monitoring, evaluasi dan	dok	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	10,000,000	-
T5.1	T5.1 Peningkatan kualitas hidup masyarakat					2,420,203,268		3,560,203,268		2,330,203,268		1,945,203,268		2,495,203,268		15,609,842,155	2,858,825,815

55.1.3.2		Indeks Resiko Bencana	poin	135	130		125		120		115		110		110		2,858,825,815
55.1.3	55.1.3 Meningkatnya ketangguhan					2,420,203,268		3,560,203,268		2,330,203,268		1,945,203,268		2,495,203,268		15,609,842,155	2,858,825,815
1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00.1		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan	%	100	100		100		100		100		100		100		324,998,000
1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00.2		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan	%	100	100		100		100		100		100		100		983,294,660
1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00.3		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan	%	100	100		100		100		100		100		100		1,550,533,155
1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2,420,203,268		3,560,203,268		2,330,203,268		1,945,203,268		2,495,203,268		15,609,842,155	2,858,825,815
1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00.1		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan	%	100	100	350,000,000	100	330,000,000	100	230,000,000	100	130,000,000	100	230,000,000	100	1,594,998,000	324,998,000
1.05.03.2.01.1.05.0.3.1.05.0.00.0.00.04.00.1	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan					350,000,000		330,000,000		230,000,000		130,000,000		230,000,000		1,594,998,000	324,998,000
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	350,000,000	100	330,000,000	100	230,000,000	100	130,000,000	100	230,000,000	100	1,594,998,000	324,998,000
1.05.03.2.01.011.0.5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana					250,000,000		230,000,000		130,000,000		30,000,000		130,000,000		1,020,000,000	250,000,000
1925		Jumlah Dokumen Peta Potensi Bencana per resiko	Dokumen	0	0	-	1	100,000,000	0	-	0	-	0	-	0	100,000,000	-
1926		Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana	Dokumen	0	1	200,000,000	0		0	-	0	-	0	-	0	200,000,000	-
1927		Jumlah Tempat Evakuasi Sementara	Titik lokasi	0	0	-	0	-	3	100,000,000	0	-	3	100,000,000	3	200,000,000	-
1928		Jumlah dokumen FS titik relokasi bencana yang	dok	0	0	-	1	100,000,000	0		0	-	0		0	100,000,000	-
1929		Jumlah dokumen analisa data/informasi	Dokumen	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	100,000,000	100,000,000
1930		Jumlah Koordinasi Perkuatan data dan informasi per	keg	7	7	50,000,000	7	30,000,000	7	30,000,000	7	30,000,000	7	30,000,000	7	320,000,000	150,000,000
1.05.03.2.01.021.0.5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi,					100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		574,998,000	74,998,000
1931		Jumlah Penyediaan dan pemasangan	Titik	0	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	250,000,000	-
1932		Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang	Orang	0	443803	50,000,000	443803	50,000,000	443803	50,000,000	443803	50,000,000	443803	50,000,000	443803	324,998,000	74,998,000
1.05.03.1.05.0.00.0.00.04.00.2		Persentase Masyarakat di Wilayah Rawan	%	100	100	1,195,203,268	100	2,385,203,268	100	1,185,203,268	100	935,203,268	100	1,385,203,268	100	8,069,311,000	983,294,660
1.05.03.2.02.1.05.0.3.1.05.0.00.0.00.04.00.2	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan					1,195,203,268		2,385,203,268		1,185,203,268		935,203,268		985,233,268		7,669,341,000	983,294,660
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	1,195,203,268	100	2,385,203,268	100	1,185,203,268	100	935,203,268	100	985,233,268	100	7,669,341,000	983,294,660
1.05.03.2.02.011.0.5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana					150,000,000		-		-		-		-		150,000,000	-

1933		Jumlah Dokumen data/informasi tentang rencana	dokumen	0	1	150,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	150,000,000	-
1.05.03.2.02.021.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan					75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		422,144,026	47,144,026
1934		Jumlah masyarakat yang ikut pelatihan	Orang	44	40	75,000,000	40	75,000,000	40	75,000,000	40	75,000,000	40	75,000,000	40	422,144,026	47,144,026
1.05.03.2.02.031.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan					140,000,000		1,540,000,000		140,000,000		140,000,000		140,000,000		2,100,000,000	-
1935		Jumlah kegiatan Koordinasi teknis inventarisasi	pemangku kepentingan (pemerintah,	0	7	20,000,000	7	20,000,000	7	20,000,000	7	20,000,000	7	20,000,000	7	100,000,000	-
1936		Jumlah sarpras operasional kesiapsiagaan	unit	0	2	120,000,000	1	1,520,000,000	2	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	2,000,000,000	-
1.05.03.2.02.041.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan					170,000,000		170,000,000		370,000,000		170,000,000		70,000,000		993,671,560	43,671,560
1937		Jumlah peralatan dan perlindungan kesiapsiagaan	unit APD, perahu karet	1	70	170,000,000	70	170,000,000	70	370,000,000	70	170,000,000	70	70,000,000	70	993,671,560	43,671,560
1.05.03.2.02.051.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana					50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		250,000,000	-
1938		Jumlah koordinasi dengan pemangku kepentingan	jumlah pemangku kepentingan	0	7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	7	50,000,000	7	250,000,000	-
1.05.03.2.02.061.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan					50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		100,000,000		609,320,234	309,320,234
1939		Jumlah Orang yang melaksanakan	Orang	20	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	100,000,000	20	609,320,234	309,320,234
1940		Jumlah koordinasi dengan pemangku kepentingan	jumlah pemangku kepentingan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
1.05.03.2.02.071.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana					30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		343,158,840	193,158,840
1941		Jumlah koordinasi dan evaluasi Rekonstruksi pasca	pemangku kepentingan (pemerintah,	7	7	30,000,000	7	30,000,000	7	30,000,000	7	30,000,000	7	30,000,000	7	343,158,840	193,158,840
1.05.03.2.02.081.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim					70,203,268		10,203,268		10,203,268		110,203,268		110,203,268		311,016,340	
1942		Jumlah Satgas Penanganan dan Mitigasi Bencana	Orang	0	2	70,203,268	1	10,203,268	1	10,203,268	3	110,203,268	3	110,203,268	3	311,016,340	
1943		Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana di BPBD	Orang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
1.05.03.2.02.091.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi					150,000,000		150,000,000		150,000,000		-		100,000,000		550,000,000	-
1944		Jumlah Evaluasi renkon	dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	-
1945		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang disusun	dokumen	0	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	0	-	0	-	0	450,000,000	-
1.05.03.2.02.101.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan					290,000,000		290,000,000		290,000,000		290,000,000		290,000,000		1,690,000,000	240,000,000
1946		Jumlah aparaturnya dan masyarakat yang mengikuti	Orang	110	150	200,000,000	150	200,000,000	150	200,000,000	150	200,000,000	150	200,000,000	150	1,150,000,000	150,000,000

1947		Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti	Orang	180	180	90,000,000	180	90,000,000	180	90,000,000	180	90,000,000	180	90,000,000	180	540,000,000	90,000,000
1.05.03.2.02.111.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.02.11 Penyusunan Rencana					20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		250,000,000	150,000,000
1948		Jumlah koordinasi dengan pemangku kepentingan	keg	7	7	20,000,000	7	20,000,000	7	20,000,000	7	20,000,000	7	20,000,000	7	250,000,000	150,000,000
1949		Jumlah dokumen rencana penanggulangan	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
1.05.03.2.04.1.05.0 3.1.05.0.00.0.00.04.00.2	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar					-		-		-		-		400,000,000		400,000,000	-
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	400,000,000	100	400,000,000	-
1.05.03.2.04.011.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi					-		-		-		-		100,000,000		100,000,000	-
1961		Jumlah regulasi penanggulangan bencana	Jenis	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	-
1.05.03.2.04.021.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan					-		-		-		-		-		-	-
1962		Jumlah kelembagaan yang dibentuk	Jenis	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
1.05.03.2.04.031.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.04.03 Kerjasama antar Lembaga dan					-		-		-		-		100,000,000		100,000,000	-
1963		Jumlah MOU yang disusun dalam rangka kerjasama	Jenis	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	-
1.05.03.2.04.041.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan					-		-		-		-		100,000,000		100,000,000	-
1964		Jenis Sistem Informasi kebencanaan yang	Jenis	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	-
1.05.03.2.04.051.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan					-		-		-		-		100,000,000		100,000,000	-
1965		Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan	dok	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	-
1.05.03.1.05.0.00.0 00.04.00.3		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan	%	100	100	875,000,000	100	845,000,000	100	915,000,000	100	880,000,000	100	880,000,000	100	5,945,533,155	1,550,533,155
1.05.03.2.03.1.05.0 3.1.05.0.00.0.00.04.00.3	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan					875,000,000		845,000,000		915,000,000		880,000,000		880,000,000		5,945,533,155	1,550,533,155
IK		Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada	%	100	100	875,000,000	100	845,000,000	100	915,000,000	100	880,000,000	100	880,000,000	100	5,945,533,155	1,550,533,155
1.05.03.2.03.011.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar					50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		550,000,000	300,000,000
1950		Persentase Penanganan Operasional	%	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	550,000,000	300,000,000
1.05.03.2.03.021.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana					340,000,000		350,000,000		360,000,000		370,000,000		370,000,000		2,170,533,155	380,533,155
1951		Jumlah orang yang mengikuti peningkatan	orang	70	0	-	0		0		0		0		0	17,257,297	17,257,297

1952		Jumlah petugas penanggulangan Bencana di BPBD	orang	10	4	90,000,000	4	90,000,000	4	90,000,000	4	90,000,000	4	90,000,000	4	540,000,000	90,000,000
1953		Persentase Penanganan Operasional	%	100	100	250,000,000	100	260,000,000	100	270,000,000	100	280,000,000	100	280,000,000	100	1,613,275,858	273,275,858
1.05.03.2.03.031.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan					50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		500,000,000	250,000,000
1954		Persentase Jumlah Korban yang tertolong dan	%	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	500,000,000	250,000,000
1.05.03.2.03.041.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik					385,000,000		345,000,000		405,000,000		360,000,000		360,000,000		2,225,000,000	370,000,000
1955		Jumlah jenis logistik dan peralatan	jenis (sandang, pangan, obat-obatan)	3	3	165,000,000	3	155,000,000	3	160,000,000	3	160,000,000	3	160,000,000	3	1,050,000,000	250,000,000
1956		Jumlah peningkatan dan pembinaan SDM	org/keg	0	66	50,000,000	66	50,000,000	66	50,000,000	66	50,000,000	66	50,000,000	66	250,000,000	
1957		Jumlah kegiatan pelatihan manajemen	keg	0	1	40,000,000	0		1	45,000,000	0		0		0	85,000,000	
1958		Persentase Logistik yang terdistribusi	%	100	100	130,000,000	100	140,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	840,000,000	120,000,000
1.05.03.2.03.051.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando					30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		150,000,000	-
1959		Jumlah aktivasi sistem komando Penanganan	keg	0	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	150,000,000	-
1.05.03.2.03.061.0 5.0.00.0.00.04.00	1.05.03.2.03.06 Respon Cepat Bencana Non Alam					20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		350,000,000	250,000,000
1960		Persentase Penanganan Respon Cepat	%	100	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	350,000,000	250,000,000

Laporan Rincian Realisasi Anggaran

s.d Januari 2022

Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.05.0.00.0.00.04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.583.181.223,00	10.135.228.373,00	87,50
1.05.0.00.0.00.04.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.583.181.223,00	10.135.228.373,00	87,50
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.390.588.242,00	7.854.637.560,00	93,61
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.632.436,00	93.917.780,00	97,19
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.589.775,00	3.589.224,00	99,98
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.508.000,00	8.504.230,00	99,96
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.352.715,00	11.350.787,00	99,98
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.999.732,00	2.999.604,00	100,00
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.833.000,00	9.532.424,00	87,99
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56.349.996,00	54.943.571,00	97,50
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.999.218,00	2.997.940,00	99,96
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.072.882.494,00	4.738.780.402,00	93,41
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.993.682.494,00	4.659.581.518,00	93,31
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.200.000,00	64.200.000,00	100,00
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000,00	14.998.884,00	99,99
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.926.972,00	5.405.000,00	78,03
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.433.000,00	2.013.000,00	82,74

Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.05.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.493.972,00	1.967.000,00	78,87
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.000.000,00	1.425.000,00	71,25
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	467.410.937,00	453.573.282,00	97,04
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.987.567,00	9.983.000,00	99,95
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.965.066,00	68.815.066,00	90,59
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.504.607,00	30.503.960,00	100,00
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.615.097,00	109.764.356,00	98,34
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.949.800,00	48.454.400,00	95,10
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.916.000,00	13.955.500,00	93,56
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.482.800,00	3.469.000,00	99,60
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.990.000,00	168.628.000,00	99,20
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.449.320,00	112.568.000,00	91,19
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	12.318.472,00	11.240.000,00	91,25
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.130.848,00	101.328.000,00	91,18
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.109.082.245,00	2.001.333.768,00	94,89
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	241.233.904,00	198.576.098,00	82,32
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.861.848.341,00	1.796.757.670,00	96,50
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	496.203.838,00	431.059.328,00	86,87
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	367.496.615,00	305.150.130,00	83,03
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.781.000,00	48.329.560,00	99,07

Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.926.223,00	77.579.638,00	97,06
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.192.592.981,00	2.280.590.813,00	71,43
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	349.630.559,00	157.780.980,00	45,13
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	249.631.869,00	63.434.000,00	25,41
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	99.998.690,00	94.346.980,00	94,35
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.570.165.285,00	1.101.673.989,00	70,16
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	574.996.451,00	512.549.709,00	89,14
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	139.994.485,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	169.997.627,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	49.992.718,00	45.233.100,00	90,48
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	49.997.317,00	49.112.500,00	98,23
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	29.998.856,00	28.188.780,00	93,97
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	95.201.006,00	69.377.700,00	72,87
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	0,00	0,00	0,00
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	439.986.918,00	378.240.600,00	85,97
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	19.999.907,00	18.971.600,00	94,86
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.272.797.137,00	1.021.135.844,00	80,23
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	25.000.000,00	17.544.000,00	70,18
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	804.300.000,00	639.784.300,00	79,55
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000,00	23.064.000,00	76,88

Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	384.997.137,00	316.038.544,00	82,09
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	20.000.000,00	16.205.000,00	81,03
TOTAL		11.583.181.223,00	10.135.228.373,00	87,50

REKAPITULASI CAPAIAN LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS (KEBENCANAAN) TAHUN 2022

KATEGORI PENCAPAIAN KEBENCANAAN						
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS UTAMA			90.88 %	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				82.65 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	100	100	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				2.65 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	13.25 %	
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	0	1	0 %	TUTUP MUTU INI
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	452991	100000	352991	22.08 %	TUTUP MUTU INI
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	452991	100000	352991	22.08 %	TUTUP MUTU INI
	4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	0	0 %	TUTUP MUTU INI
	5 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	452991	100000	352991	22.08 %	TUTUP MUTU INI
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				90.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	100	100	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				10.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	50.00 %	
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	1	0	1	0 %	TUTUP MUTU INI
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	30	30	0	100.00 %	TUTUP MUTU INI
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %	
		Ya Terjadi Bencana				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	100	100	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %	
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	0	100.00 %	TUTUP MUTU INI
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	100	100	0	100.00 %	TUTUP MUTU INI
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	100	100	0	100.00 %	TUTUP MUTU INI
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	100	100	0	100.00 %	TUTUP MUTU INI
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	100	100	0	100.00 %	TUTUP MUTU INI

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

LAPORAN KEJADIAN BENCANA TAHUNAN
KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022

No	Jenis Bencana	Tanggal Kejadian	Waktu Kejadian	Lokasi Bencana					Penyebab Bencana	Deskripsi
				Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Link/Kampung	Koordinat		
1	Banjir	10 Januari 2022	22.15 WIB	Cilegon	Jombang	Jombang Wetan Sukmajaya	Link Rokal,Rt 01,02,03,04 Rw 10 Link Jambu,Rt 01 Rw 01 Link Seneja Rt 04 Rw 01		Hujan dengan intensitas Sedang-Lebat di wilayah Kota Cilegon menyebabkan air meluap ke pemukiman dan Drainase yang tidak berfungsi dengan baik	Selasa 11 Januari 2022 Pukul 01.40 WIB Genangan Air di beberapa titik masih menggenang +-15 s/d 50cm, Dan sebagian sudah mulai surut.
					Grogol Ciwandan	Rawa Arum Kubangasari	Link Kruwuk,Rt 03 Rw 07 Link Kebanjiran Rt 02,Rw 02			
2	Banjir	13 Januari 2022	20.00 WIB	Cilegon	Jombang	Jombang Wetan Sukmajaya	Link Rokal,Rt 01,02,03,04 Rw 10 Link Jambu,Rt 01 Rw 01 Link Seneja Rt 04 Rw 01		Hujan dengan intensitas Sedang-Lebat di wilayah Kota Cilegon dan Air Luapan dari kali ke pemukiman dan Drainase yang tidak berfungsi dengan baik	Kamis 13 Januari 2022 Pukul 21.40 WIB Genangan Air di beberapa titik masih menggenang - +15 s/d 40cm, Dan sebagian sudah mulai surut.
					Cilegon Cilegon	Ketileng Ciwaduk	Link Darmakesuma,Rt 12 Rw 03 Link Kavling Blok E Rt 10 Rw 05			
3	Banjir	14 Januari 2022	20.00 WIB	Cilegon	Jombang	Jombang Wetan Sukmajaya	Link Rokal,Rt 01,02,03,04 Rw 10 Link Jambu,Rt 01 Rw 01 Link Seneja Rt 04 Rw 01		Cuaca Ekstream Hujan dengan intensitas Sedang-Lebat di wilayah Kota Cilegon dan Air Luapan dari kali ke pemukiman dan Drainase yang tidak berfungsi dengan baik	Genangan Air di beberapa titik masih menggenang - +15 s/d 40cm, Dan sebagian sudah mulai surut Jumlah Yang Terdampak Dalam Kejadian Tersebut Ada 505 KK dan 2.031 Jiwa
					Cilegon Jombang	Bendungan Masigit	Link Kapling Blok J Rt 06 Rw 03 Link Terate Udik Rw 01 Rw 01,02			
4	Tanah Longsor	15 Januari 2022	09.10 WIB	Cilegon	Cilegon	Ciwedus	Link Ciwedus Rt 03 Rw 02		Hujan Deras Yang Melanda Kota Cilegon Selama Kurun Waktu 3 Jam Mengakibatkan Tembok Penahan Tanah (TPT) Longsor Dan Longsoran Menutupi Akses Jalan Utama	Rumah Warga Mengalami Kerusakan Ringan a.n Bpk Romli Dengan Kerugian Kurang Lebih 5 juta Rupiah Dan Jumlah Korban Jiwa NIHIL
5	Pohon Tumbang	18 Januari 2022	20.30 WIB	Cilegon	Grogol	Rawa Arum	Link Tegal Wangi Masjid Rt 02 Rw 02		Cuaca Ekstream Dengan Angin Kencang Yang Mengakibatkan Pohon Tumbang Dan Menimpa Salah Satu Rumah Milik Warga	Pohon Tumbang Yang Menutupi Akses Jalan Warga Link Tegal Wangi Rt.02 Rw 02 Kelurahan Rawa Arum Sehingga Tidak Bisa Di Lalui Oleh Pejalan Kaki dan Menimpa Salah Satu Atap Milik Warga Tidak Ada Korban Jiwa Dalam Kejadian Tersebut
6	Pohon Tumbang	18 Januari 2022	20.30 WIB	Cilegon	Grogol	Rawa Arum	Link Tegal Wangi Masjid Rt 02 Rw 02		Cuaca Ekstream Dengan Angin Kencang Yang Mengakibatkan Pohon Tumbang Dan Menimpa Salah Satu Rumah Milik Warga	Pohon Tumbang Yang Menutupi Akses Jalan Warga Link Tegal Wangi Rt.02 Rw 02 Kelurahan Rawa Arum Sehingga Tidak Bisa Di Lalui Oleh Pejalan Kaki dan Menimpa Salah Satu Atap Milik Warga Tidak Ada Korban Jiwa Dalam Kejadian Tersebut
7	Rumah Ambruk	28 Januari 2022	09.00 WIB	Cilegon	Cibeber	Cibeber	Perum Blok D85 No 15 Rt 06 Rw 05		Hujan Dengan Intensitas Sedang - Lebat Di Kota Cilegon Dan Bangunan Yang Sudah Rapuh Mengakibatkan Atap Rumah Runtuh	Rumah Warga Mengalami Kerusakan Berat a.n Bpk Bayu Seno Dan Kerugian Di Taksir Kurang Lebih 20 Juta Rupiah Denga Jumlah 1 KK 3 Jiwa

8	Pohon Tumbang	04 Februari 2022	20.30 WIB	Cilegon	Citangkil	Samangraya	Link Kalentemu Rt 05/05		Cuaca Ekstrim Hujan Deras Dan Angin Kencang Di Kota Cilegon Mengakibatkan Pohon Tumbang	Berkoordinasi Dengan Dinas Terkait Untuk Melakukan Pemotongan Pohon Dalam Hal Ini Dinas PERKIM Untuk Segera Melakukan Pemangkasan Pohon – Pohon Yang Sudah Rindang Yang Berlokasi Di Jalan – Jalan Yang Sering Di Lalui Pengendara. Masyarakat Harus Meningkatkan Kewaspadaan dan Juga Berhati – Hati Karena Cuaca Ekstrim Seperti Ini Sering Mengakibatkan Pohon Tumbang.
9	Rumah Ambruk (Atap Rumah)	06 Februari 2022	10.00 WIB	Cilegon	Gerem	Grogol	Link Cikuasa RT 02 RW 01		Hujan dengan intensitas Sedang dan Angin yang cukup kencang sehingga mengakibatkan Atap rumah roboh,Bangunan yang sudah rapuh	1.Team BPBD Kota Cilegon Melakukan Pendataan(Asessment) 2.Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Berhati – Hati Karena Angin Bertiup Sangat Kencang 3.Berkoordinasi Dengan Bpk RT / RW Setempat Untuk Meneruskan Informasi Tersebut Kepada Warga nya Agar Selalu Waspada
10	Pohon Tumbang	10 Februari 2022	09.00 WIB	Cilegon	Jombang	Kubang Laban	Jl Link Keranggot		Akar Pohon Yang Sudah Rapuh Dan Hujan Dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat Di Sertai Angin Kencang Mengakibatkan Pohon Tumbang	Pohon Tumbang Yang Menutupi Akses Jalan Menuju Pasar Keranggot Sehingga Kendaraan Roda Dua Dan Roda Empat Tidak Bisa Melalui Jalan Tersebut
11	Rumah Ambruk (Atap Rumah)	14 Februari 2022	09.30 WIB	Cilegon	Ciwandan	Kubang Sari	Link Kubangwelut Rt 04 Rw 04		Cuaca Ekstreem/Hujan Di Sertai Angin Kencang Mengakibatkan Atap Rumah Roboh	1.Team BPBD Kota Cilegon Melakukan Pendataan (Asessment) 2.Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Berhati – Hati Karena Angin Bertiup Sangat Kencang 3.Berkoordinasi Dengan Bpk RT / RW Setempat Untuk Meneruskan Informasi Tersebut Kepada Warga nya Agar Selalu Waspada 4.Berkoordinasi Dengan Dinas atau Dengan Kelurahan Untuk Segera Membantu Korban Yang
12	Pohon Tumbang	24 februari 2022	09.00 WIB	Cilegon	Jombang	Masigit	Link Terateudik Rt 05/02		Hujan Deras Dan Angin Kencang Yang Mengakibatkan 1 Pohon Kelapa Tumbang Dan Menimpa Salah Satu Rumah Milik Warga	1 Rumah Milik Warga a.n Bpk Joko (Pegawai SATPOL PP)Mengalami Kerusakan Berat Dan Menghimbau Kepada Masyarakat Agar Berhati-Hati Dan Waspada Terutama Rumah-Rumah Yang Berdekatan Dengan Pohon Besar Karena Cuaca Saat Ini Sangat Ekstrem Dan Mengalami Kerugian Sekitar 15 Jt
13	BANJIR	01 Maret 2022	09.30 WIB	Cilegon	Cibeber	Cibeber	Link Sambirata Rw 04 Rt 03 & 04		Hujan dengan intensitas Sedang-Lebat Yang Mengguyur di wilayah Kota Cilegon Dan Air Luapan dari Sungai ke pemukiman dan Aliran Sungai Yang Tidak Bisa Menampung Derasnya Air	Berkoordinasi Dengan Dinas Terkait Untuk Merevitalisasi/Pembenahan Saluran Air. Dan Untuk Perangkat Kelurahan Setempat, Agar Menghimbau Kepada Warga Supaya Tidak Membuang Sampah Sembarangan, Yang bisa Menyebabkan Tersumbatnya Saluran Air
14	POHON TUMBANG	07 Maret 2022	10.30 WIB	Cilegon	Pulomerak	Suralaya	Link Buah Dodol Rt 01 Rw 06		Cuaca Extrem Dan Angin Kencang Yang Melanda Kota Cilegon Mengakibatkan Sebuah Pohon Tumbang Yang Menimpa Kabel Milik PLN	Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Berhati – Hati Karena Angin Bertiup Sangat Kencang ,Berkoordinasi Dengan Bpk RT / RW Setempat Untuk Meneruskan Informasi Tersebut Kepada Warga nya Agar Selalu Waspada

15	KEBAKARAN LAHAN	04 April 2022	12.15 WIB	Cilegon	Cibeber	Kalitimbang	Link Krotek Rt 05/02		Api Berasal Dari Pembakaran Sampah Yang Di Tinggalkan Oleh Warga Sehingga Api Merambat Ke Rumput Alang-alang Di Lahan Kosong Seluas +- 1400 m	Berkoordinasi Dengan Dinas Pemadam Kebakaran Serta Ikut Memadamkan Api Dan Menghimbau Kepada Warga Agar Tidak Sembarangan Membakar Sampah Lalu Di Tinggalkan
16	KEBAKARAN LAHAN	18 April 2022	00.17 WIB	Cilegon	Ciwandan	Kubangsari	Jl Lingkar Selatan Km 13.2		Api Berasal Dari Pembakaran Sampah Yang Di Tinggalkan Oleh Warga Sehingga Api Merambat Ke Rumput Alang-alang Di Lahan Kosong Seluas +- 500 m	Berkoordinasi Dengan Dinas Pemadam Kebakaran Serta Ikut Memadamkan Api Dan Menghimbau Kepada Warga Agar Tidak Sembarangan Membakar Sampah Lalu Di Tinggalkan
17	BANJIR	27 April 2022	17.30 WIB	Cilegon	Ciwandan Jombang Cibeber	Sukmajaya Jombang Wetan Cibeber Kalitimbang Kubangsari	Link Sawah Rt 01,02/02 Link Sawah Rt 02/02 Link Rokal Barat Rt 01/11 Griya Praja Mandiri Blok C & H Blok F 1,2,3 Link Ciberko Link Penauan Rt 01/04 Link Kebanjiran Rt 01/02		Curah Hujan Dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat Pada Pukul 17.30 WIB Yang Menyebabkan Banjir Di Beberapa Titik Di Wilayah Kota Cilegon Serta Drainase Yang Tidak Berfungsi Dengan Baik Dan Angin Kencang Yang Menyebabkan Pohon Tumbang	Berkoordinasi Dengan Dinas Terkait Untuk Merevitalisasi/Pembenahan Saluran Air,Dan untuk Perangkat Kelurahan Setempat Agar Menghimbau Kepada warga nya supaya tidak membuang sampah sembarangan yang menyebabkan tersumbatnya saluran air
18	POHON TUMBANG	27 April 2022	17.30 WIB	Cilegon	Ramanuju	Purwakarta	Jl ADB (Jalan Kembar)		Curah Hujan Dengan Intensitas Sedang Hingga Lebat Pada Pukul 17.30 WIB Yang Menyebabkan Banjir Di Beberapa Titik Di Wilayah Kota Cilegon Serta Drainase Yang Tidak Berfungsi Dengan Baik Dan Angin Kencang Yang Menyebabkan Pohon Tumbang	Berkoordinasi Dengan Dinas Terkait Untuk Melakukan Pemotongan Pohon Dalam Hal Ini Dinas PERKIM Untuk Segera Melakukan Pemangkasan Pohon – Pohon Yang Sudah Rindang Yang Berlokasi Di Jalan – Jalan Yang Sering Di Lalui Pengendara. Masyarakat Harus Meningkatkan Kewaspadaan dan Juga Berhati – Hati Karena Cuaca Ekstrim Seperti Ini Sering Mengakibatkan Pohon Tumbang.
19	POHON TUMBANG	08 Mei 2022	14.35 WIB	Cilegon	Jombang	Sukmajaya	Link Keranggot Rt 02 Rw 04		Akar Pohon yang sudah Rapuh disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang Dan Menutupi Akses Jalan Utama Menuju Pasar Keranggot	Berkoordinasi Dengan Dinas Terkait Untuk Melakukan Pemotongan Pohon Dalam Hal Ini Dinas PERKIM Untuk Segera Melakukan Pemangkasan Pohon – Pohon Yang Sudah Rindang Yang Berlokasi Di Jalan – Jalan Yang Sering Di Lalui Pengendara. Masyarakat Harus Meningkatkan Kewaspadaan dan Juga Berhati – Hati Karena Cuaca Ekstrim Seperti Ini Sering Mengakibatkan Pohon Tumbang.
20	POHON TUMBANG	11 Mei 2022	19.35 WIB	Cilegon	Cibeber	Kedaleman	Jl Raya Bojonegara KM.2		Akar Pohon Yang Sudah Rapuh disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang Serta Umur Pohon Yang Sudah Termakan Usia	Berkoordinasi Dengan Dinas Terkait Untuk Melakukan Pemotongan Pohon Dalam Hal Ini Dinas PERKIM Untuk Segera Melakukan Pemangkasan Pohon – Pohon Yang Sudah Rindang Yang Berlokasi Di Jalan – Jalan Yang Sering Di Lalui Pengendara. Masyarakat Harus Meningkatkan Kewaspadaan dan Juga Berhati – Hati Karena Cuaca Ekstrim Seperti Ini Sering Mengakibatkan Pohon Tumbang.

21	KEBAKARAN LAHAN	12 Mei 2022	17.30 WIB	Cilegon	Cilegon	Panggung Rawi	Link Cigiceh		Api Berasal Dari Warga Yang Sengaja Membakar Rumput Alang – alang Sehingga Api Menjadi Besar Dan Hampir Merembet Ke Permukiman Warga	Berkoordinasi Dengan Aparat Setempat Dalam Hal Ini Rt Dan Rw Untuk Menghimbau Kepada Warga Nya Agar Tidak Membakar Apapun Di Sembarangan Tempat Lalu Di Tinggalkan -Berkoordinasi Dengan Dinas Pemadam Kebakaran Serta Ikut Memadamkan Api
22	POHON TUMBANG	21 Mei 2022	17.00 WIB	Cilegon	Kalitimbang	Cibeber	Jl Lingkar Selatan KM 2		Akar Pohon Yang Sudah Rapuh disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang Serta Umur Pohon Yang Sudah Termakan Usia	Berkoordinasi Dengan Dinas Terkait Untuk Melakukan Pemotongan Pohon Dalam Hal Ini Dinas PERKIM Untuk Segera Melakukan Pemangkasan Pohon – Pohon Yang Sudah Rindang Yang Berlokasi Di Jalan – Jalan Yang Sering Di Lalui Pengendara. Masyarakat Harus Meningkatkan Kewaspadaan dan Juga Berhati – Hati Karena Cuaca Ekstrim Seperti Ini Sering Mengakibatkan Pohon Tumbang Dan Di Tambah Dengan Banyaknya Pohon Yang Sudah Termakan Usia/Rapuh
23	RUMAH ROBOH	29 Mei 2022	10.15 WIB	Cilegon	Purwakarta	Pabean	Link Gempol Wetan RT 04 RW 02		Cuaca Extrim/Hujan disertai Angin kencang Yang Mengakibatkan Atap Rumah Roboh	Team BPBD Kota Cilegon Melakukan Pendataan (Assessment) .,Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Berhati – Hati Karena Angin Bertiup Sangat Kencang Berkoordinasi Dengan Bpk RT / RW Setempat Untuk Meneruskan Informasi Tersebut Kepada Warga nya Agar Selalu Waspada Berkoordinasi Dengan Dinas atau Dengan Kelurahan Untuk Segera Membantu Korban Yang Bersifat Kebutuhan Mendesak
24	KEBAKARAN LAHAN	25 Juni 2022	15.20 WIB	Cilegon	Cibeber	Cibeber	Link Larangan RT 02 RW 12		Api Berasal Dari Warga Yang Sengaja Membakar Rumput Alang – alang Lalu Di Tinggalkan Sehingga Api Menjadi Besar Dan Merambat Ke Pemukiman Warga	Berkoordinasi Dengan Aparat Setempat Dalam Hal Ini Rt Dan Rw Untuk Menghimbau Kepada Warga Nya Agar Tidak Membakar Apapun Di Sembarangan Tempat Lalu Di Tinggalkan -Berkoordinasi Dengan Dinas Pemadam Kebakaran Serta Ikut Memadamkan Api
25	BANJIR	06 Juli 2022	10.00 WIB	Cilegon	Ciwandan	Tegal Ratu	Link Lijajar Rt 013 Rw 06		Hujan dengan intensitas Sedang-Lebat di wilayah Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Mengakibatkan Saluran Air Mengalami Pendangkalan Dan Penyempitan Sehingga Menggenangi Sebagian Rumah Warga	Berkoordinasi Dengan Dinas Terkait Untuk Merevitalisasi/Pembenahan Saluran Air. Dan Untuk Perangkat Kelurahan Setempat, Agar Menghimbau Kepada Warga Supaya Tidak Membuang Sampah Sembarangan, Yang bisa Menyebabkan Tersumbatnya Saluran Air.
26	RUMAH ROBOH	06 Juli 2022	05.30 WIB	Cilegon	Ciwandan	Banjarnegara	Link Sobong Rt 09 Rw 03		Bangunan rumah yang berada di lereng Serta Angin yang Kencang dan Rembesan air hujan yang menggerus pondasi sehingga menyebabkan roboh nya tembok rumah bagian dapur Di Karenakan Bangunan sudah rapuh.	Pemilik Rumah Saat ini Sedang Melakukan Renovasi Dengan Material Bantuan Dari Pihak Kelurahan dan Tokoh Masyarakat, Guna Menutupi Tembok Yang Ambruk.

27	RUMAH AMBRUK	16 Juli 2022	11.21 WIB	Cilegon	Citangkil	Lebak Denok	Jl Sunan Drajat Link. Jeruk Nipis RT.06 RW.03		Hujan Dengan intensitas sedang hingga deras yang mengakibatkan atap dan dinding Rumah Roboh	Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Berhati – Hati Karena Angin Bertiup Sangat Kencang Dan Berkoordinasi Dengan Bpk RT / RW Setempat Untuk Meneruskan Informasi Tersebut Kepada Warga nya Agar Selalu Waspada
28	POHON TUMBANG	15 Agustus 2022	14.00 WIB	Cilegon	Cibeber	Cibeber	Link Cibeber Timur		Cuaca Extrem Dan Angin Kencang Yang Melanda Kota Cilegon Mengakibatkan Sebuah Pohon Tumbang	Berkoordinasi Dengan Dinas Terkait Dalam Hal Ini Dinas Perkim Agar Melakukan Pemotongan Dan Pemangkasan Pohon Yang Sudah Rapuh Dan Rimbun
29	POHON TUMBANG	16 Agustus 2022	07.30 WIB	Cilegon	Purwakarta	Kota Bumi	Jl Raya Cilegon Merak (Depan Kampus UNTIRTA Cilegon		Cuaca Extrem Dan Angin Kencang Yang Melanda Kota Cilegon Mengakibatkan Sebuah Pohon Tumbang Yang Menimpa 1 Angkutan Kota (angkot) Jurusan Cilegon Merak a.n Bpk Hawaseh	Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang
30	RUMAH ROBOH	16 Agustus 2022	09.00 WIB	Cilegon	Citangkil	Kebonsari	Link Krenceng Rt 002/004		Bangunan Yang Sudah Rapuh Di sertai Hujan Dengan Intensitas Sedang Yang Mengakibatkan Atap Rumah Ambrol	Team BPBD Kota Cilegon Melakukan Pendataan (Asessment) Dan Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Berhati – Hati Karena Angin Bertiup Sangat Kencang
31	KEBAKARAN LAHAN	18 Agustsus 2022	15.25 WIB	Cilegon	Cibeber	Kedaleman	Jl Raya Bojonegara		Api Berasal Dari Pembakaran Sampah yang di Tinggalkan Oleh Salah Seorang Karyawan Pt Sidomulyo Selaras Sehingga Api Menyambar Ke Mobil Yang Tidak Terpakai Milik PT Sidomulyo Selaras	Berkoordinasi Dengan Aparat Setempat Dalam Hal Ini Rt Dan Rw Untuk Menghimbau Kepada Warga Nya Agar Tidak Membakar Sampah Sembarangan Lalu Di Tinggalkan
32	KEBAKARAN LAHAN	19 Agustsus 2022	00.20 WIB	Cilegon	Cibeber	Kedaleman	Jl Raya Bojonegara		Api Berasal Dari Percikan Bara Api Dalam Mesin Mobil Hidup Kembali	Berkoordinasi Dengan Dinas Pemadam Kebakaran Serta Ikut Memadamkan Api
33	BANJIR	21 Agustus 2022	13.30 WIB	Cilegon	Pulomerak	Taman Sari	Link Sudimampir & Link Baru		<i>Hujan dengan intensitas Sedang-Lebat di wilayah Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Mengakibatkan Saluran Air Mengalami Pendangkalan Dan Penyempitan Sehingga Menggenangi Sebagian Rumah Warga</i>	Berkoordinasi Dengan Dinas Terkait Untuk Merevitalisasi/Pembenahan Saluran Air. Dan Untuk Perangkat Kelurahan Setempat, Agar Menghimbau Kepada Warga Supaya Tidak Membuang Sampah Sembarangan, Yang bisa Menyebabkan Tersumbatnya Saluran Air.
34	POHON TUMBANG	22 Agustus 2022	11.30 WIB	Cilegon	Ciwandan	Kubangsari	Link Pintu Air Rt 01 Rw 04		Cuaca Extrem Dan Angin Kencang Yang Melanda Di Beberapa Wilayah Kota Cilegon Mengakibatkan Sebuah Pohon Tumbang Yang Berada Di Wilayah Kelompok Wanita Tani (KWT) Kelurahan Kubangsari	Melakukan kordinasi dengan pihak RT/RW setmpat,Bhabinsa/Bhabinkantibmas setempat, Aparatur Kelurahan Kubangsari dan intansi terkait lainnya.

35	RUMAH ROBOH	23 Agustus 2022	13.40 WIB	Cilegon	Ciwandan	Kubangsari	Link Pintu Air Rt 01 Rw 04		Bangunan Yang Sudah Rapuh Di sertai Hujan Dengan Intensitas Sedang Yang Mengakibatkan Atap Rumah Ambrol	Team BPBD Kota Cilegon Melakukan Pendataan (Asessment)DanMenghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Berhati – Hati Karena Angin Bertiup Sangat Kencang
36	POHON TUMBANG	06 September 2022	07.05 WIB	Cilegon	Cilegon	Ciwaduk	Jl Rinjani Kav Blok F		Hujan Dengan Intensitas Sedang Hingga Deras Yang Di Sertai Angin Kencang Mengakibatkan Pohon Tumbang	Berkoordinasi Dengan Dinas Terkait Dalam Hal Ini Dinas Perkim Agar Melakukan Pemotongan Dan Pemangkasan Pohon Yang Sudah Rapuh Dan Rimbun
37	POHON TUMBANG	12 September 2022	11.48 WIB	Cilegon	Pulomerak	Mekarsari	Link Gunung Batur Rt 02 Rw 03		Cuaca Extrem Dan Angin Kencang Yang Melanda Di Beberapa Wilayah Kota Cilegon Mengakibatkan Sebuah Pohon Tumbang Dan Di Tambah Dengan Usia Pohon Yang Sudah Tua Merak a.n Bpk Hawaseh	Berkoordinasi Dengan Pihak PLN Untuk Segera Memutus Aliran Listrik Yang Tertimpa Pohon /Pemangkasan Pohon Yang Sudah Mulai Rimbun Dan Rapuh
38	RUMAH ROBOH	19 September 2022	17.15 WIB	Cilegon	Ciwandan	Kubangsari	Link Kubangsaron		Hujan Deras Yang Disertai Angin Kencang, Hingga Menyebabkan Atap Rumah Ambruk	Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Berhati – Hati Karena Angin Bertiup Sangat Kencang Dan Berkoordinasi Dengan Bpk RT / RW Setempat Untuk Meneruskan Informasi Tersebut Kepada Warga nya Agar Selalu Waspada
39	BANJIR	22 September 2022	09.00 WIB	Cilegon	Pulomerak	Taman Sari	Link Baru Rt 01,02,03 Rw 04		Hujan dengan intensitas Sedang-Lebat Pada Pukul 08:30 s/d 09:30 WIB di wilayah Merak Dan Saluran Air/Drainase Mengalami Pendangkalan Dan Penyempitan	Berkoordinasi Dengan Dinas Terkait Untuk Merevitalisasi/Pembenahan Saluran Air. Dan Untuk Perangkat Kelurahan Setempat, Agar Menghimbau Kepada Warga Supaya Tidak Membuang Sampah Sembarangan, Yang bisa Menyebabkan Tersumbatnya Saluran Air
40	POHON TUMBANG	23 September 2022	08.00 WIB	Cilegon	Purwakarta	Kota Bumi	Jl Akses Toll Cilegon Timur Barat		Cuaca Ekstrim Di Wilayah Kota Cilegon Dan Angin Kencang Menyebabkan Dahan Pohon Patah Menutupi Separuh Jalan Menuju Toll Cilegon Barat	Menghimbau Kepada Seluruh Pengendara Yang Akan Memasuki Jalan Toll Agar Selalu Berhati Hati Karena Cuaca Tidak Menentu
41	KEBAKARAN LAHAN	26 September 2022	20.07 WIB	Cilegon	Cibeber	Kalitimbang	Link Gedung Baya Rt 02 Rw 04		Api Berasal Dari Pembakaran Sampah yang di Tinggalkan Oleh Salah Seorang Sehingga Api Membesar Sehingga Menggenangi Sebagian Rumah Warga	Berkoordinasi Dengan Aparat Setempat Dalam HaL Ini Rt Dan Rw Untuk Menghimbau Kepada Warga Nya Agar Tidak Membakar Sampah Sembarangan Lalu Di Tinggalkan
42	KEBAKARAN TANGKI	01 Oktober 2022	23.00 WIB	Cilegon	Ciwandan	Kepuh	Link Ciwandan		Api Berasal Dari Tanki Linc Berbahan Solar Tersambar Petir Sehingga Menyebkan Kebakaran	Minggu, 02 Oktober 2022 Pukul : 04:00 WIB Api Sudah Padam Sepenuhnya, dan Warga Sudah Mulai Kembali Ke rumah masing-masing. -Damkar Kota Cilegon dibantu, BPBD Kota Cilegon, BPBD Kab. Serang, PMI Kota Cilegon dan TAGANA Kota Cilegon melakukan upaya Pemadaman Api dan mengevakuasi warga Ke titik aman sejauh +-1km dari titik Kebakaran, sesuai instruksi dari Wali Kota Cilegon

43	LAKA LAUT	08 Oktober 2022	01.15 WIB	Cilegon	Pulomerak	Mekarsari	Perairan Merak Besar		<p>Pada hari Sabtu, 08 Oktober 2022 sekitar pukul 01.15 Wib ABK Kapal Rishel melaporkan di anjungan bahwa ada orang jatuh ke laut dengan ciri-ciri berjenis kelamin laki laki, memakai kaos abu abu, celana jeans biru dongker menjatuhkan diri di lambung kiri di deck 1 KMP Rishel pada pukul 01.12 Wib</p> <p>PDTW 01.20 KMP Rishel melaporkan ke LPS bahwa ada orang jatuh ke laut, pada saat itu KMP Rishel melaporkan bahwa kapal tidak bisa memutar balik karena perairan sempit dan cuaca buruk dengan kecepatan angin 24 knot dan tinggi gelombang 2 meter dan diijinkan melanjutkan sandar di dermaga 4 Merak Yang Sudah Tua Merak a.n Bpk Hawaseh</p>	<p>1.Koordinas Dengan Basarnas Banten,Lanal Banten,Pol airud Banten Dan Unsur Yang Terlibat Lainnya</p> <p>2.Turut Serta Dalam Pencarian Korban Di Perairan Merak Cilegon Banten.</p>
44	POHON TUMBANG	10 Oktober 2022	09.25 WIB	Cilegon	Citangkil	Kebonsari	Link Weri RT 01 RW 02		<p>Cuaca Extrem Dan Angin Kencang Yang Melanda Di Beberapa Wilayah Kota Cilegon Mengakibatkan Sebuah Pohon Tumbang Dan Di Tambah Dengan Usia Pohon Yang Sudah Tua Dan Menimpa Rumah Milik Warga</p>	<p>Berkoordinasi Dengan Pihak PLN Untuk Segera Memutus Aliran Listrik Yang Tertimpa Pohon /Pemangkasan Pohon Yang Sudah Mulai Rimbun Dan Rapuh</p> <p>-Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang.</p> <p>- Melakukan kordinasi dengan Pihak Kelurahan Dan Rt Rw Setempat</p>
45	LAKA LAUT	11 Oktober 2022	12.00 WIB	Cilegon	Pulomerak	Mekarsari	Perairan Merak Besar		<p>Pada hari Sabtu, 08 Oktober 2022 sekitar pukul 01.15 Wib ABK Kapal Rishel melaporkan di anjungan bahwa ada orang jatuh ke laut dengan ciri-ciri berjenis kelamin laki laki, memakai kaos abu abu, celana jeans biru dongker menjatuhkan diri di lambung kiri di deck 1 KMP Rishel pada pukul 01.12 Wib</p> <p>PDTW 01.20 KMP Rishel melaporkan ke LPS bahwa ada orang jatuh ke laut, pada saat itu KMP Rishel melaporkan bahwa kapal tidak bisa memutar balik karena perairan sempit dan cuaca buruk dengan kecepatan angin 24 knot dan tinggi gelombang 2 meter dan diijinkan melanjutkan sandar di dermaga 4 Merak Yang Sudah Tua</p>	<p>1.Koordinas Dengan Basarnas Banten,Lanal Banten,Pol airud Banten Dan Unsur Yang Terlibat Lainnya</p> <p>2.Turut Serta Dalam Pencarian Korban Di Perairan Merak Cilegon Banten.</p>
									<p>Pada hari Sabtu, 08 Oktober 2022 sekitar pukul 01.15 Wib ABK Kapal Rishel melaporkan di anjungan bahwa ada orang jatuh ke laut dengan ciri-ciri berjenis kelamin laki laki, memakai kaos abu abu, celana jeans biru</p>	

46	LAKA LAUT	12 Oktober 2022	12.00 WIB	Cilegon	Pulomerak	Mekarsari	Perairan Merak Besar		<p>dongker menjatuhkan diri di lambung kiri di deck 1 KMP Rishel pada pukul 01.12 Wib</p> <p>PDTW 01.20 KMP Rishel melaporkan ke LPS bahwa ada orang jatuh ke laut, pada saat itu KMP Rishel melaporkan bahwa kapal tidak bisa memutar balik karena perairan sempit dan cuaca buruk dengan kecepatan angin 24 knot dan tinggi gelombang 2 meter dan diijinkan melanjutkan sandar di dermaga 4 Merak Yang Sudah Tua Merak a.n Bpk Hawaseh</p>	<p>1.Koordinas Dengan Basarnas Banten,Lanal Banten,Pol airud Banten Dan Unsur Yang Terlibat Lainnya</p> <p>2.Turut Serta Dalam Pencarian Korban Di Perairan Merak Cilegon Banten.</p>
47	POHON TUMBANG	14 Oktober 2022	13.45 WIB	Cilegon	Cibeber	Cibeber	Link Cibeber Timur Rt 01 Rw 01		<p>Akibat Hujan Dengan Intensitas Lebat Dan Di sertai Angin Kencang</p>	<p>Berkoordinasi Dengan Aparat Setempat Dalam HaL Ini Rt Dan Rw Untuk Menghimbau Kepada Warga Nya Agar Tidak Membakar Sampah Sembarangan Lalu DiBerkoordinasi Dengan Pihak PLN Untuk Segera Memutus Aliran Listrik Yang Tertimpa Pohon /Pemangkasan Pohon Yang Sudah Mulai Rimbun Dan Rapuh</p> <p>- Melakukan kordinasi dengan Pihak Kelurahan Dan Rt Rw Setempat</p>
48	POHON TUMBANG	16 Oktober 2022	04.30 WIB	Cilegon	Jombang	Jombang Wetan	Link Rokal Barat Rt 02 Rw 11		<p>Akibat Angin Kencang Yang Melanda Beberapa Wilayah Di Kota Cilegon Dan Pohon Yang Sudah Rapuh</p>	<p>Berkoordinasi Dengan Aparat Setempat Dalam HaL Ini Rt Dan Rw Untuk Menghimbau Kepada Warga Nya Agar Tidak Membakar Sampah Sembarangan Lalu DiBerkoordinasi Dengan Pihak PLN Untuk Segera Memutus Aliran Listrik Yang Tertimpa Pohon /Pemangkasan Pohon Yang Sudah Mulai Rimbun Dan Rapuh</p> <p>- Melakukan kordinasi dengan Pihak Kelurahan Dan Rt Rw Setempat</p>
49	POHON TUMBANG	18 Oktober 2022	08.45 WIB	Cilegon	Jombang	Jombang Wetan	Link Rokal Barat Rt 02 Rw 11		<p>Jln Stasiun Cilegon Link.Rokal Barat RT 02 RW 11 Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten Dan Menimpa Bangunan Badan Kordinasi Pendidikan Al Qur an Dan Keluarga Sakinah Indonesia (BKPAKSI)</p>	<p>Berkoordinasi Dengan Aparat Setempat Dalam HaL Ini Rt Dan Rw Untuk Menghimbau Kepada Warga Nya Agar Tidak Membakar Sampah Sembarangan Lalu DiBerkoordinasi Dengan Pihak PLN Untuk Segera Memutus Aliran Listrik Yang Tertimpa Pohon /Pemangkasan Pohon Yang Sudah Mulai Rimbun Dan Rapuh</p> <p>- Melakukan kordinasi dengan Pihak Kelurahan Dan Rt Rw Setempat</p>
50	KEBAKARAN LAHAN	19 Oktober 2022	18.10 WIB	Cilegon	Purwakarta	Purwakarta	Link Kubang Welingi Rt 08 Rw 03		<p>Pembakaran Sampah Yang Di tinggalkan, Kemudian Merambat Ke Rumput ilalang Seluas +-3 Hektare</p>	<p>Pada Pukul 19.20 WIB Api Sudah Padam Sepenuhnya Dan Kondisi Mulai Aman Dan Terkendali</p> <p>- Team BPBD Kota Cilegon Melakukan Assessment kelokasi</p> <p>- Team BPBD Membantu Proses Pemadaman Api</p>
51	KEBAKARAN LAHAN	20 Oktober 2022	22.00 WIB	Cilegon	Jombang	Sukmajaya	Samping Gerbang Taman Cilegon		<p>Adanya Pembakaran ilalang yang Di tinggalkan, Kemudian Merambat Ke Rumput ilalang Seluas 500 m²</p>	<p>Pada Pukul 22.30 WIB Api Sudah Padam Sepenuhnya Dan Kondisi Mulai Aman Dan Terkendali</p> <p>- Team BPBD Kota Cilegon Melakukan Assessment kelokasi</p> <p>- Team BPBD Membantu Proses Pemadaman Api</p>

52	POHON TUMBANG	26 Oktober 2022	07.25 WIB	Cilegon	Jombang	Gedong Dalem	Cigicah RT 03/021		Cuaca Extrem Dan Angin Kencang Yang Melanda Di Beberapa Wilayah Kot Cilegon Yang Di Sertai Angin Kencang	BBerkoordinasi Dengan Pihak PLN Untuk Segera Memutus Aliran Listrik Yang Tertimpa Pohon /Pemangkasan Pohon Yang Sudah Mulai Rimbun Dan Rapuh -Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. Membantu Evakuasi Pohon
53	POHON TUMBANG	26 Oktober 2022	08.30 WIB	Cilegon	Pulomerak	Lebak Gede	Link.Cipala RT 01 RW 05		Cuaca Extrem Dan Hujan Yang Disertai Angin Kencang	Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Melakukan kordinasi dengan Pihak Kelurahan Dan Rt Rw Setempat
54	POHON TUMBANG	29 Oktober 2022	10.20 WIB	Cilegon	Citangkil	Kebonsari	Link Cimerak RT 03/03		Cuaca Extrem Dan Hujan Yang Disertai Angin Kencang Dan Di Tambah Pohon Yang Sudah Rapuh	Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Melakukan kordinasi dengan Pihak Kelurahan Dan Rt Rw Setempat - Membantu Evakuasi Pohon
55	POHON TUMBANG	30 Oktober 2022	21.35 WIB	Cilegon	Grogol	Kotabumi	Perum Palm Hills		Cuaca Extrem Dan Hujan Yang Disertai Angin Kencang Dan Di Tambah Pohon Yang Sudah Rapuh	Berkoordinasi Dengan Pihak PLN Untuk Segera Memutus Aliran Listrik Yang Tertimpa Pohon /Pemangkasan Pohon Yang Sudah Mulai Rimbun Dan Rapuh- Membantu Evakuasi Pohon
56	KEBAKARAN LAHAN	31 Oktober 2022	15.10 WIB	Cilegon	Purwakarta	Kotabumi	Perum Bukit Palem Hills		Diduga Api Berasal Pembakaran sampah yang ditinggalkan, kemudian merambat ke rumput ilalang seluas +- 0,5 hektare	Selesai Pemadaman Pada Pukul 16.30 WIB - Team BPBD Membantu Proses Pemadaman Api - Team BPBD Kota Cilegon Melakukan Assessment lokasi
57	KEBAKARAN LAHAN	03 November 2022	14.30 WIB	Cilegon	Cibeber	Kalitimbang	Jl Lingkar Selatan		Diduga Api Berasal Pembakaran Sampah Yang Di tinggalkan, Kemudian Merambat Ke Tumpukan Ban Mobil Bekas dan Rumput Ilalang Seluas +-50m	Pada Pukul 19.20 WIB Selesai pemadaman pada pukul 13:30WIB, kondisi aman dan terkendali - Team BPBD Kota Cilegon Melakukan Assessment lokasi - Team BPBD Membantu Proses Pemadaman Api
58	POHON TUMBANG	04 November 2022	21.30 WIB	Cilegon	Purwakarta	Kotabumi	Jl Jendral Sudirman		Cuaca Extrem Dan Angin Kencang Yang Melanda Di Beberapa Wilayah Kota Cilegon Mengakibatkan Sebuah Pohon Tumbang Dan Di Tambah Dengan Usia Pohon Yang Sudah Tua	Berkoordinasi Dengan Pihak PLN Untuk Segera Memutus Aliran Listrik Yang Tertimpa Pohon /Pemangkasan Pohon Yang Sudah Mulai Rimbun Dan Rapuh -Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Evakuasi Pohon

										- Membantu Evakuasi Pohon
59	POHON TUMBANG	07 November 2022	09.00 WIB	Cilegon	Citangkil	Warnasari	Taman Warnasari Indah		Hujan Deras Yang di Sertai Angin Kencang	Evakuasi Pohon Selesai pada pukul 11:15 WIB, Kondisi Aman & Terkendali -Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Evakuasi Pohon
60	KEGAGALAN TEKNOLOGI	11 November 2022	21.20 WIB	Cilegon	Ciwandan	Kepuh	Link Ciromo		Diduga Tumpahan Nikel Jenis Logam Overload Jenis Yang Terbakar : Smelter (Ruang Peleburan)	Selesai pemadaman pada pukul 23:30WIB, kondisi aman dan terkendali - Team BPBD Kota Cilegon Melakukan Assessment kelokasi - Team BPBD Membantu Proses Pemadaman Api
61	POHON TUMBANG	11 November 2022	05.40 WIB	Cilegon	Pulomerak	Tamansari	Link Babakan Suri Rt 02/01		Angin Kencang Yang di Sertai Hujan Lebat	Evakuasi Pohon Selesai pada pukul 07:30 WIB, Kondisi Aman & Terkendali -Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Evakuasi Pohon
62	POHON TUMBANG	11 November 2022	17.00 WIB	Cilegon	Grogol	Gerem	Link Cikuasa Pantai RT 02/02		Akibat Hujan Dengan Intensitas Lebat Dan Di sertai Angin Kencang	Evakuasi Pohon Selesai pada pukul 19:00 WIB, Kondisi Aman & Terkendali -Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Evakuasi Pohon
63	RUMAH AMBRUK	12 November 2022	15.20 WIB	Cilegon	Citangkil	Citangkil	Link Kubang Sepat RT 03/010		Cuaca Extrim/Hujan disertai Angin kencang mengakibatkan Atap Rumah Ambruk.	Pukul 15:20 WIB Sedang Melakukan Evakuasi dan Pendataan -Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Membersihkan Puing – Puing
64	POHON TUMBANG	14 November 2022	17.00 WIB	Cilegon	Purwakarta	Ramanuju	Di Dalam Lingkungan KODIM Cilegon		Pohon Sudah tua dan Akar Sudah Tidak Kuat Menopang Batang Pohon Yang Rimbun	Evakuasi Pohon Selesai pada pukul 18:15 WIB, Kondisi Aman & Terkendali - Membantu Evakuasi Pohon
65	POHON TUMBANG	17 November 2022	06.40 WIB	Cilegon	Purwakarta	Ramanuju	Link Ramanuju RT 08/05		Hujan Lebat Yang Melanda Kota Cilegon dan Di Sertai Angin Kencang Mengakibatkan Pohon Tumbang dan Menutup Sebagian Jalan Utama Menuju Anyer Cigading	Evakuasi Pohon Selesai pada pukul :07.45 WIB, Kondisi Aman & Terkendali -Menghimbau Kepada Seluruh Pengendara Yang Hendak Melewati Jalan Utama Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang - Membantu Evakuasi Pohon
66	RUMAH AMBRUK	18 November 2022	07.00 WIB	Cilegon	Citangkil	Kebonsari	Link Krenceng Rt 02/04		Cuaca Extrim/Hujan disertai Angin kencang mengakibatkan Atap Rumah Ambruk	Pukul 14:30 WIB Sedang Melakukan Evakuasi dan Pendataan -Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Membersihkan Puing – Puing - Berkoordinasi Dengan Pihak RT/RW atau Pihak Kelurahan Agar Menyarukan Himbauan Cuaca Extrim

										Kelurahan Agar Meneruskan Himbauan Cuaca Ekstrem
67	POHON TUMBANG	19 November 2022	16.10 WIB	Cilegon	Purwakarta	Ramanuju	Link Ramanuju RT 08/05		Batang Pohon Yang Sudah Rapuh Disertai Dengan Angin Kencang	<ul style="list-style-type: none"> - Evakuasi Pohon Selesai pada pukul 17:20 Kondisi Aman & Terkendali -Menghimbau Kepada Seluruh Pengendara Yang Hendak Melewati Jalan Utama Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang - Melakukan Assesment - Membantu Evakuasi Pohon
68	RUMAH AMBRUK	19 November 2022	06.40 WIB	Cilegon	Ciwandan	Banjarnegara	Link Temugiring RT 01/01		Cuaca Extrim/Hujan disertai Angin kencang mengakibatkan Atap Rumah Ambruk.	<p>Pukul 07:50 WIB Sedang melakukan Evakuasi dan pendataan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Membersihkan Puing – Puing - Berkoordinasi Dengan Pihak RT/RW atau Pihak Kelurahan Agar Meneruskan Himbauan Cuaca Extrim
69	RUMAH AMBRUK	19 November 2022	08.20 WIB	Cilegon	Ciwandan	Banjarnegara	Link Sobong RT 09/03		Cuaca Extrim/Hujan disertai Angin kencang mengakibatkan Atap Rumah Ambruk.	<p>Pukul 08:45 WIB Sedang melakukan Evakuasi dan pendataan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Membersihkan Puing – Puing - Melakukan kordinasi dengan Lurah Banjar Negara dan RT Setempat
70	KEBAKARAN LAHAN	29 November 2022	18.45 WIB	Cilegon	Cibeber	Cibeber	Link Cibeber Barat RT 01/02		Diduga Api Berasal Pembakaran Sampah Yang Di tinggalkan Oleh Seorang Warga, Kemudian Merambat	<p>Pada Pukul 19.30 WIB Selesai pemadaman, kondisi aman dan terkendali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Team BPBD Kota Cilegon Melakukan Assessment kelokasi - Team BPBD Membantu Proses Pemadaman Api
71	POHON TUMBANG	29 November 2022	22.45 WIB	Cilegon	Cilegon	Ciwaduk	Link.Pasar Kelapa		Angin Kencang Dan Di Tambah Usia Pohon Yang Sudah Mulai tua Dan Rapuh	<p>Evakuasi Pohon Selesai Pada Pukul 00:15 WIB Akses Jalan Yang Tertutup Pohon Tumbang Sudah Kembali Normal</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Evakuasi Pohon
72	POHON TUMBANG	01 DESEMBER 2022	17.50 WIB	Cilegon	Cibeber	Cibeber	PCI Blok D 59		Bekas Galian Pipa Gas Yang Di Tinggalkan Oleh Pihak Pekerja Yang Mengakibatkan Pohon Tumbang Dan Pohon Tumbang Tersebut Menimpa Pagar Milik Warga	<p>Evakuasi Pohon Selesai pada pukul 19:30 WIB, Kondisi Aman & Terkendali dan Teman - teman BPBD Membantu Evakuasi Pohon</p>
73	KEBAKARAN LAHAN	05 DESEMBER 2022	17.50 WIB	Cilegon	Cibeber	Kalitimbang	Link Ciberko Rt 04/03		Diduga Api Berasal Pembakaran Sampah Yang Di tinggalkan, Kemudian Merambat Ke Rumput Ilalang Seluas - +500m	<p>Api sudah padam pukul 15:45 WIB dan kondisi sekarang sudah aman dan terkendali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Team BPBD Kota Cilegon Melakukan Assessment kelokasi - Team BPBD Membantu Proses Pemadaman Api

										- Team BPBD Membantu Proses Pemadaman Api
74	POHON TUMBANG	07 DESEMBER 2022	19.54 WIB	Cilegon	Grogol	Gerem	Link Kalibaru Rt 02/ Rw 02		Hujan Di Sertai Angin Kencang Dan Di Tambah Usia Pohon Yang Sudah Mulai tua Dan Rapuh	-Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Evakuasi Pohon
75	POHON TUMBANG	08 Desember 2022	06.30 WIB	Cilegon	Grogol	Gerem	Link Cikuasa Bawah		Batang Pohon Dibakar Secara Sengaja Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab dan Disertai Angin Kencang	- Evakuasi selesai pada pukul 08:00 WIB, Kondisi Aman & Terkendali - Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada
76	POHON TUMBANG	11 Desember 2022	14.45 WIB	Cilegon	Ciwandan	Kubangsari	Jl Sunan Bonang		Cuaca Ekstrem (Hujan Deras Yang disertai Angin Kencang)	- Pukul 16:15WIB Arus Lalulintas Sudah Kembali Normal -Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang.
77	Rumah Ambruk	14 Desember 2022	13.00 WIB	Cilegon	Grogol	Rawa arum	Link Cidangdang		Hujan Ringan Disertai Angin Mengembus Dengan Kencang Mengakibatkan Rumah Roboh	Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Membersihkan Puing – Puing
78	POHON TUMBANG	14 Desember 2022	11.50 WIB	Cilegon	Citangkil	Kebonsari	Link Lowong sawo		Cuaca Ekstrem Angin Kencang Dan Pohon Sudah Termakan Usia (Pohon Tua)	Evakuasi Pohon Selesai pada Pukul 15:00 WIB -Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang.
79	POHON TUMBANG	14 Desember 2022	15.45 WIB	Cilegon	Purwakarta	Kota Bumi	Jl Gn Ciremai Rt 02/06		Cuaca Ekstrem Angin Kencang Dan Pohon Yang Sudah Keropos Karena Di Bakar Oleh Salah Seorang Warga	Evakuasi Pohon Selesai pada Pukul 17:00 WIB -Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Evakuasi Pohon
80	KEBAKARAN LAHAN	19 Desember 2022	20.05 WIB	Cilegon	Purwakarta	Kota Bumi	Link Leuwung Sawo RT 01/01		Diduga dibakar oleh ODGJ	Selesai pemadaman pada pukul 20:45 WIB, kondisi aman dan terkendali - Team BPBD Kota Cilegon Melakukan Assessment kelokasi - Team BPBD Membantu Proses Pemadaman Api
81	POHON TUMBANG	20 Desember 2022	13.50 WIB	Cilegon	Grogol	Rawa arum	Link Markedinata no 5 T.G		Cuaca Ekstrem (Angin Kencang) Di Tambah Pohon Yang Sudah Tua Dan Di Makan Usia	Pukul 16:45 Wib Arus Lalulintas Sudah Kembali Normal - Membantu Evakuasi Pohon

82	POHON TUMBANG	22 Desember 2022	19.30 WIB	Cilegon	Ciwandan	Samangraya	Link Kubangwelut Rt 02/04		-(Cuaca Ekstrem)Hujan Deras Disertai Angin Kencang Yang Melanda Beberapa Wilayah Di Kota Cilegon	-Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Evakuasi Pohon
83	POHON TUMBANG	23 Desember 2022	07.30 WIB	Cilegon	Cibeber	Kalitimbang	Jl Lingkar Selatan		-(Cuaca Ekstrem) Hujan Deras Disertai Angin Kencang Yang Melanda Beberapa Wilayah Di Kota Cilegon	Pukul 08.10 Wib Arus Lalulintas Sudah Kembali Normal
84	POHON TUMBANG	23 Desember 2022	08.10 WIB	Cilegon	Pulomerak	Gerem	Jl Utama Merak Cikuas Atas		Cuaca extrim Angin Kencang dan Batang Pohon Besar Sudah Tua/Di Makan Usia	Pukul 09.30 Wib Arus Lalulintas Sudah Kembali Normal -Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Evakuasi Pohon
85	POHON TUMBANG	27 Desember 2022	06.10 WIB	Cilegon	Pulomerak	Gerem	Jl Utama Merak Cikuas Atas		Cuaca extrim Angin Kencang dan Batang Pohon Besar Sudah Tua/Di Makan Usia	Pukul 07.40 Wib Arus Lalulintas Sudah Kembali Normal -Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Evakuasi Pohon
86	POHON TUMBANG	27 Desember 2022	10.47 WIB	Cilegon	Citangkil	Dringo	Link Deringo Kidul		Cuaca Extrim Hujan Yang Di Sertai Angin Kencang dan Batang Pohon Sudah Lapuk	Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Evakuasi Pohon
87	POHON TUMBANG	27 Desember 2022	10.50 WIB	Cilegon	Pulomerak	Tamansari	Link Babakan Turi Rt 05/02		-Cuaca Extrim Hujan Yang Di Sertai Angin Kencang Dan Batang Pohon Sudah Lapuk	Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Evakuasi Pohon
88	POHON TUMBANG	28 Desember 2022	09.15 WIB	Cilegon	Pulomerak	Mekarsari	Link Gunung Batur Rt 01/03		Hujan Yang Di Sertai Angin Kencang dan Batang Pohon Besar Sudah Tua	Evakuasi selesai pada pukul 10.15 WIB, Kondisi Aman & Terkendali - Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang.
89	POHON TUMBANG	28 Desember 2022	16.10 WIB	Cilegon	Jombang	Sukmajaya	Link Sukmajaya Rt 01/03 (Depan Regent)		Hujan Yang Di Sertai Angin Kencang dan Batang Pohon Besar Sudah Tua	Menghimbau Kepada Seluruh Warga Yang Sedang Melewati Jalan Agar Berhati – Hati Untuk Melintas Ke Jalan Utama Yang Banyak Pohon – Pohon Besar - Membantu Evakuasi Pohon

90	POHON TUMBANG	28 Desember 2022	17.10 WIB	Cilegon	Purwakarta	Kota Bumi	Link Kaligandu Komplek Rt 05/12		Hujan Yang Di Sertai Angin Kencang dan Batang Pohon Besar Sudah Tua	- Evakuasi selesai pada pukul 17.30 WIB, Kondisi Aman & Terkendali - Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang - Membantu Evakuasi Pohon
91	POHON TUMBANG	28 Desember 2022	17.30 WIB	Cilegon	Purwakarta	Purwakarta	Jl Kaligandu Link Kubang welingi Rt 08/03		Hujan Yang Di Sertai Angin Kencang dan Batang Pohon Besar Sudah Tua dan Menimpa Kabel Milik TELKOM INDONESIA	Evakuasi selesai pada pukul 19.20 WIB, Kondisi Aman & Terkendali - Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang - Membantu Evakuasi Pohon
92	POHON TUMBANG	28 Desember 2022	20.30 WIB	Cilegon	Grogol	Rawa arum	Jl Bujang Gabung (MAN 2 Cilegon)		Hujan Yang Di Sertai Angin Kencang dan Batang Pohon Besar Sudah Tua dan Menimpa Kabel Milik TELKOM INDONESIA	Evakuasi selesai pada pukul 21.20 WIB, Kondisi Aman & Terkendali - Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang - Membantu Evakuasi Pohon
93	POHON TUMBANG	28 Desember 2022	17.20 WIB	Cilegon	Purwakarta	Kota Bumi	Jl Tegal Padang		Cuaca Extrem dan Hujan Yang Di Sertai Angin Kencang Mengakibatkan Pohon Tumbang Dan Menimpa Kabel Milik TELKOM INDONESIA	Evakuasi selesai pada pukul 18.15 WIB, Kondisi Aman & Terkendali - Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang. - Membantu Evakuasi Pohon
94	POHON TUMBANG	28 Desember 2022	21.30 WIB	Cilegon	Cibeber	Cibeber	Perum Grand Cilegon		Hujan Yang Di Sertai Angin Kencang dan Batang Pohon Besar Sudah Tua dan Menimpa Pos Ronda Milik Warga	Evakuasi selesai pada pukul 22.20 WIB, Kondisi Aman & Terkendali - Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang - Membantu Evakuasi Pohon
95	POHON TUMBANG	28 Desember 2022	22.30 WIB	Cilegon	Citangkil	Kebonsari	Link Weri Rt 01/02		Hujan Yang Di Sertai Angin Kencang dan Batang Pohon Besar Sudah Tua dan Menimpa Pos Rumah Milik Warga a.n Mastuni (2 KK 6 Jiwa)	Evakuasi selesai pada pukul 23.20 WIB, Kondisi Aman & Terkendali - Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang - Membantu Evakuasi Pohon
96	POHON TUMBANG	28 Desember 2022	16.02 WIB	Cilegon	Jombang	Jombang Wetan	Link Gedong Dalem		Cuaca Extrem Hujan Yang Di Sertai Angin Kencang	Evakuasi selesai pada pukul 16.45 WIB, Kondisi Aman & Terkendali - Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang - Membantu Evakuasi Pohon

97	POHON TUMBANG	28 Desember 2022	16.23 WIB	Cilegon	Purwakarta	Kota Bumi	Per Fivestar KS		Hujan Yang Di Sertai Angin Kencang	Evakuasi selesai pada pukul 17.50 WIB, Kondisi Aman & Terkendali - Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang - Membantu Evakuasi Pohon
98	POHON TUMBANG	28 Desember 2022	16.15 WIB	Cilegon	Purwakarta	Kota Bumi	Link Damkar		Hujan Yang Di Sertai Angin Kencang	Evakuasi selesai pada pukul 17.30 WIB, Kondisi Aman & Terkendali - Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang - Membantu Evakuasi Pohon
99	POHON TUMBANG	29 Desember 2022	07.20 WIB	Cilegon	Cilegon	Masigit	Gg Paus Rt 03/06		Cuaca Extrem Hujan Yang Di Sertai Angin Kencang	- Evakuasi selesai pada pukul 08.50 WIB, Kondisi Aman & Terkendali - Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang - Membantu Evakuasi Pohon
100	POHON TUMBANG	29 Desember 2022	09.00 WIB	Cilegon	Cibeber	Cibeber	Link Kadipaten Rt 01/02		Cuaca Extrem Hujan Yang Di Sertai Angin Kencang Yang Menimpa Warung Milik Warga	Evakuasi selesai pada pukul 09.50 WIB, Kondisi Aman & Terkendali - Menghimbau Kepada Seluruh Warga Agar Selalu Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Dan Angin Kencang - Membantu Evakuasi Pohon
101	POHON TUMBANG	29 Desember 2022	09.58 WIB	Cilegon	Purwakarta	Kebondalem	Link Rama Baru RT 01/06		Cuaca Extrem Hujan Yang Di Sertai Angin Kencang	Menghalangi Jalan Menuju Lapangan Fasilitas Umum Warga dan Membantu Evakuasi Pohon

NO	KEBENCANAAN	JUMLAH
1	BANJIR	8
2	POHON TUMBANG	58
3	RUMAH AMBRUK	14
4	TANAH LONGSOR	2
5	KEBAKARAN LAHAN	14
6	KEGAGALAN TEKNOLOGI	2
7	LAKA AIR	3
TOTAL		101

Kegiatan Forum Gruop Discussion (FGD)



Kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana



Seripat Banten

Kabar Banten
RABU, 28 DESEMBER 2022

2

Kanwil Kemenkumham Banten Selama 2022

PNBP Capai Rp 289 Miliar

SERANG, (KB) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Banten telah mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 289.816.619.865 sepanjang 2022.

PNBP tersebut diperoleh dari layanan Administrasi Hukum Umum, Kelayakan Intelektual, Keingrasiaran, dan Pemasyarakatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Banten Tedy Harwanto, saat ekspor kinerja sepanjang 2022, di Aula Lantai III Kanwil Kemenkumham Banten, Selasa (27/12/2022).

Selain PNBP, beberapa capaian kinerja yang di paparkan, di antaranya pembahasan reformasi birokrasi, keterbukaan informasi publik, fasilitasi Raperda, kelayakan intelektual, sinergitas aparat penegak hukum dan stakeholder, hingga layanan bantuan hukum gratis.

Pada kesempatan tersebut, Tedy Harwanto menekankan kepada jajaran agar tidak bergasut diri dan tetap memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan ahlak dan melaksanakannya sesuai petunjuk undang-undang serta profesionalisme.

"Semoga Kanwil Kemenkumham Banten senantiasa diberikan kemudahan dan



KEPALA Kanwil Kemenkumham Banten Tedy Harwanto memberikan keterangan pers kepada awak media saat ekspor kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Selasa (27/12/2022).

kelancaran dalam tugas pengabdian kepada bangsa dan negara," katanya.

Dalam pemaparannya, diungkapkan untuk layanan paspor dan pengawasan keingrasiaran, Kanwil Kemenkumham Banten sudah menribikan layanan paspor sebanyak 164.789 layanan.

Dari total tersebut, sebanyak 38.894, di antaranya merupakan layanan paspor to tahun serta melakukan pengesakan hukum ketimprasan melalui 652 kegiatan pengawasan sepanjang 2022.

Kemudian, di Bidang Layanan Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham Banten berhasil membolehkan sebanyak 11.159 permohonan kelayakan intelektual, memfasilitasi 233 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dan membantu pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat ku-

rang mampu dengan total 447 perkara.

Selanjutnya, di Bidang Pemasyarakatan, pada 2022 Kanwil Kemenkumham Banten telah berhasil melaksanakan sebanyak 71 kegiatan pelatihan dengan jumlah 1.654 WBP telah bersertifikasi di bidang agribisnis, manufaktur, dan jasa.

Seluruh capaian yang berhasil diraih Kanwil Kemenkumham Banten sepanjang Tahun 2022 ini, adalah berkat kolaborasi dan sinergitas yang dibentuk Kanwil Kemenkumham Banten baik di lingkup internal maupun eksternal," ucapnya.

la merinci, berbagai bentuk kerja sama dijalin Kanwil Kemenkumham Banten dengan stakeholder terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik di bidang layanan hukum dan HAM, ketimprasan, dan pemasyarakatan. (Idham Gusur)***

Polda Banten-PT Pelindo Bahas Pedoman Kerja Teknis

SERANG, (KB) - Polda Banten menggelar pertemuan dengan PT Pelindo (Persero) Regional 2 Banten dalam rangka pembahasan tata naskah pedoman kerja teknis (PKT), di salah satu hotel di Kota Serang, Selasa (27/12/2022).

Pertemuan dipimpin Dirpanmobvit Polda Banten Kombes Pol Eddy Sumardi dan diikuti Deputi General Manager Kepatuhan Bisnis PT Pelindo (Persero) Regional 2 Banten Agus Fuzi bersama Tim Pokja Polda Banten dan PT Pelindo (Persero) Regional 2 Banten.

"Hari ini (kemarin) saya memimpin rapat pembahasan

tata naskah pedoman kerja teknis antara PT Pelindo (Persero) Regional 2 Banten dengan Polda Banten," kata Dirpanmobvit Polda Banten Kombes Pol Eddy Sumardi. Ia mengungkapkan, Dirpanmobvit Polda Banten memiliki program terobosan sebagaimana implementasi Commander Wish Kapolda Banten.

"Di Sather Dirpanmobvit kami membuat terobosan dengan TAAAT, yaitu Tertib, Aman, Agamis, dan Terintegrasi," ujarnya. Ia menuturkan, dalam melaksanakan pengamungan personel Dirpanmobvit telah menerapkan SOP yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Personel kami melaksanakan tipologi sesuai dengan SOP, setelah selesai, dan setelah pelaksanaan kegiatan," ucapnya.

Sementara itu, Deputy General Manager Kepatuhan Bisnis PT Pelindo (Persero) Regional 2 Banten Agus Fuzi berharap dalam pembahasan kali ini akan menghasilkan perjanjian kerja sama yang lebih baik lagi.

"Hersama-sama melakukan pembahasan turunan dari kerja sama sebelumnya dengan harapan kami mudah-mudahan yang kami bahas dapat menghasilkan perjanjian yang lebih baik lagi," tuturnya. (Idham Gusur)***



DIRPANMOBIT Polda Banten Kombes Pol Eddy Sumardi bersama pihak PT Pelindo (Persero) Regional 2 Banten saat pembahasan membahas tata naskah pedoman kerja teknis, di salah satu hotel di Kota Serang, Selasa (27/12/2022).

Puluhan Penerangan Jalan Umum Rusak di Kota Serang Mulai Diperbaiki

SERANG, (KB) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang mulai memperbaiki puluhan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Kota Serang di Jalan Jenderal Sudirman dan Jenderal Ahmad Yani. Dari total 36 titik PJU yang rusak, 13 titik di antaranya masih belum diperbaiki. Ditargetkan sebelum Tahun Baru 2023 seluruh

ruhnya sudah diperbaiki.

Sudah dari kemarin (Senin) diperbaiki. Kami mulai memperbaiki dan menormalkan 12 titik di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman yang menjadi kewenangan Dishub Kota Serang. Besok (hari ini) kami lanjutkan lagi untuk memperbaiki PJU," kata Kepala Bidang (Kabid) Teknis Sarana dan Prasarana (Tek-

sar) pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang, Hardi Purnomo, Selasa (27/12/2022).

Penyelesaian perbaikan PJU, ujar dia, akan dilakukan setiap hari selama sepekan ini. "Setiap hari kami lakukan sesuai arahan dari pak wali kota. Hari ini (kemarin) kami kerjakan dari Jalan Ciceri sampai Sari Asih dan sudah terpasang 7, di-

tambah 12. Jadi, tersisa 13 unit lagi yang harus kami perbaiki," ucapnya.

Berdasarkan penelusuran, kobahnya PJU rusak pada jaringan dan panel lampu. Untuk antisipasi dan meminimalisasi kerusakan PJU, dilakukan penggantian pada jaringan yang semula di bawah tanah menjadi di atas. Termasuk meng-

ganti lampu menjadi *light emitting diode* atau LED agar cahayanya lebih terang.

"Kerusakan pada lampu. Kemudian jaringan dan panel untuk lampu. Makanya tadi kami ganti lampunya dengan yang baru jenis LED. Terus juga jaringan kami ganti yang di atas tanah, di bawah tanah, sekarang jaringannya ada di

udara, jadi lebih memudahkan perawatan," tuturnya.

Selengkapnya dia menyebutkan, total PJU yang terpasang di Kota Serang berdasarkan data 2020 sebanyak 1.400 dan 105 di antaranya mengalami kerusakan dan tidak berfungsi.

Namun, saat ini yang diprioritaskan diperbaiki sebanyak 32 titik tersebut khususnya yang

berada di jalan protokol. Kepala Dishub Kota Serang Ikhwal menuturkan, jika terdapat ratusan PJU di sejumlah titik di wilayah Kota Serang yang mengalami kerusakan. "Memang ada banyak, mungkin ratusan yang rusak. Tapi kan kewenangannya ada yang punya Kota Serang, pemprov, dan pusat," katanya. (Rizki/H-42)***



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon



H. HELLDY AGUSTIAN, S.E., S.H., M.H.
Wakil Wali Kota Cilegon

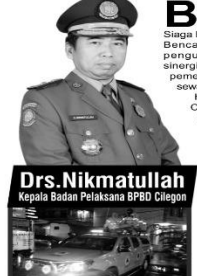


H. SANUJI PENTAMARTA, S.I.P., M.I.P.
Wakil Wali Kota Cilegon



Apel Siaga Bencana BPBD Kota Cilegon

Manifestasi Kesiapan Menghadapi Bencana



Drs. Nikmatullah
Kepala Badan Pelaksana BPBD Cilegon

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon sebagai *leading sector* kebencanaan menggelar Apel Siaga Bencana. Selasa (27/12/2022), Apel Siaga Bencana sendiri dilaksanakan dalam rangka penguatan kesiapsiagaan dan membangun sinergitas antar lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu terjadi.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta, Sekda Cilegon, Maman Mauludin, Asda 1, II dan III. Para pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkot Cilegon. Serta diikuti oleh belasan instansi lainnya seperti Tagana, PMI, Kelurahan Siaga Bencana, Orari, Rapi, Senkon Mitra Polri Polres Cilegon dan lainnya.

Dalam sambutannya Wakil Kota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, kegiatan apel siaga bencana ini merupakan suatu forum antar lembaga pemerintah, non pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

"Saya menghargai kegiatan ini

bukan hanya kegiatan seremonial belaka, tetapi merupakan manifestasi kesiapan pemerintah daerah, TNI, Polri maupun berbagai komponen masyarakat dalam mengantisipasi apabila terjadi bencana di kota Cilegon," katanya.

Ia menuturkan, Potensi bencana di Kota Cilegon dilihat dari sudut pandang geografis. Kota Cilegon memiliki potensi bencana yang cukup besar. Bahkan ada konsekuensi lain, yaitu kemungkinan munculan risiko bencana hingga 11 potensi.

"Berdasarkan kajian risiko bencana tahun 2016, Kota Cilegon memiliki potensi bahaya atau ancaman bencana sebanyak 12 potensi. Di antaranya, banjir, tanah longsor, gempa ekstrem, Epidemik dan wabah penyakit, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kegagalan teknologi, kebakaran, tanah longsor, tsunami dan tentunya konflik sosial dan terror," ujarnya.

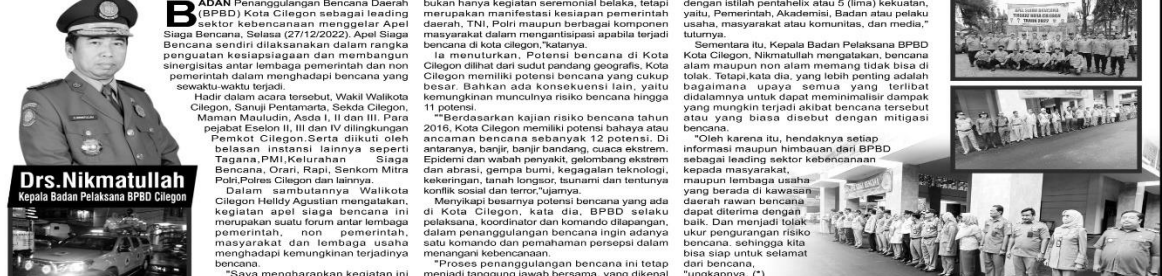
Menyikapi besarnya potensi bencana yang ada di Kota Cilegon, kata dia, BPBD selaku pelaksana, koordinator dan komando dilapangan, dalam penanggulangan bencana ingin adanya satu komando dan pemahaman persepsi dalam menangani kebencanaan.

"Proses penanggulangan bencana ini tetap menjadi tanggung jawab bersama, yang dikenal

dengan istilah *pentahelix* atau 5 (lima) kekuatan, yaitu, Pemerintah, Akademisi, Badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPBD Kota Cilegon, Nikmatullah mengatakan, bencana alam maupun non alam memang tidak bisa di tolak. Tetapi, kata dia, yang lebih penting adalah bagaimana upaya semua yang terlibat didalamnya untuk dapat meminimalisir dampak yang mungkin terjadi akibat bencana tersebut atau yang biasa disebut dengan mitigasi bencana.

"Oleh karena itu, hendaknya setiap informasi maupun himbauan dari BPBD sebagai *leading sector* kebencanaan kepada masyarakat, maupun lembaga usaha yang berada di kawasan daerah rawan bencana dapat diterima dengan baik. Dan menjadi tolak ukur penguatan risiko bencana, sehingga kita bisa siap untuk selamat dari bencana," ungkapnya. (*)





SUASANA Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana yang digelar di Aula BPBD Kota Cilegon, Kamis (25/8/2022).

Ratusan Zat Radioaktif Tersimpan di Cilegon

CILEGON, (KB). - Ratusan zat radioaktif diketahui tersimpan di Kota Cilegon. Namun sampai saat ini belum diketahui cara penanganannya. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Kesiapsiagaan Bencana yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon, Kamis (25/8/2022).

Ketua Forum Pengawasan Risiko Bencana (FPRB) Kota Cilegon DR Romi Wiryadinata mengatakan, ada ratusan zat radioaktif di Kota Cilegon. Namun sampai saat ini belum ada data dan ke mana untuk cara penanganannya. "Yang harus dipikirkan, apakah kita ada bencana keagungan teknologi, apa yang harus dilakukan. Karena selama ini, sampai yang dilakukan, adalah bencana alam seperti tsunami drill atau juga gempa bumi," katanya.

Isa membeber, selama ini peramp BPBD Kota Cilegon sudah cukup banyak, begitu juga dengan stakeholder lainnya. Hal itu,

perlu dilakukan terus-menerus sosialisasi secara berkala. Di mana BPBD Kota Cilegon sudah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi bencana, seperti banjir, longsor, dan bencana lainnya.

"Dan perlu digarisbawahi, bahwa titik lumpur atau *hotspot* yang ada saat ini, belum terdata ulang. Karena itu masuk dari peserta yang hadir tentang revisi Perda nomor 1 mengenai kesiapsiagaan bencana, sangat perlu sekali," ujarnya.

Dalam Perda tersebut, usul, akan dimasukkan *point-point* penting. Mulai dari penanganan, penanganan, dan lainnya. Sehingga, ketika terjadi bencana ini, keluar dan diarahkan. Maka penanganan bencana akan sesuai dengan Perda.

"Yang harus diingat, titik lumpur yang sudah ada di Perda, saat ini sudah banyak yang berubah. Bahkan bilang, ada karena itu, titik lumpur harus dipetakan ulang. Kemudian, kita-kita akan dipantau dan kita akan bisa kita akan bisa. Begitu juga dengan *hotspot* yang ada, kita akan bisa kita akan bisa," katanya.

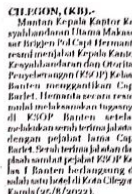
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Cilegon Nizamullah menuturkan, kesiapsiagaan bencana merupakan salah

satu strategi untuk mencegah terjadinya korban dalam keadaan darurat. Di mana BPBD Kota Cilegon sudah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi bencana. Baik yang diakibatkan oleh alam maupun oleh manusia. Oleh karena itu, kami meminta agar dalam hal ini bisa membahas dan ada sebuah rekomendasi yang bisa diujikan dalam penanganan bencana baik alam maupun manusia," katanya.

Kota Cilegon, ujar dia, dengan luas wilayah 175,5 km persegi, memiliki 12 potensi bencana. Karena secara geografis, Kota Cilegon juga dilalui oleh dua *eleven* api dan dua lempeng *Kurata* dan Australia yang dikenal dengan *megathrust*. Maka adanya 12 potensi bencana harus diikuti dengan serius.

Berikutan kajian risiko bencana pada 2019, Kota Cilegon memiliki potensi bahaya atau ancaman bencana sebanyak 12 potensi, di antaranya banjir, longsor, gempa bumi, kebakaran, epidemi, dan wabah penyakit, gelombang ekstrem dan tsunami, gempa bumi, gelombang teknologi, kekeringan, tanah longsor, tsunami, dan tentunya konflik sosial dan teror. (H-45)

Hermanta Pimpin KSOP Kelas I Banten

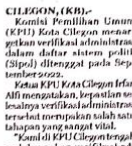


Brigjen Pol Capt Hermanta Mantu, Kepala Kantor Keselamatan dan Keamanan Publik Kota Cilegon, Kamis (25/8/2022).

Brigjen Pol Capt Hermanta Mantu, Kepala Kantor Keselamatan dan Keamanan Publik Kota Cilegon, Kamis (25/8/2022).

Salah satu program yang akan dijalankan oleh KSOP Kelas I Banten yang dipimpin oleh Brigjen Pol Capt Hermanta Mantu, Kepala Kantor Keselamatan dan Keamanan Publik Kota Cilegon, Kamis (25/8/2022).

KPU Cilegon Targetkan Verifikasi Administrasi Selesai September

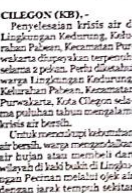


SUASANA verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 di KPU Kota Cilegon, Kamis (25/8/2022).

SUASANA verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 di KPU Kota Cilegon, Kamis (25/8/2022).

KPU Kota Cilegon akan melakukan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 akan selesai pada bulan September.

Penyelesaian Krisis Air di Kedurung Ditarget 2 Pekan



Wahana Nufus

Wahana Nufus

Wahana Nufus, Kepala Kantor Keselamatan dan Keamanan Publik Kota Cilegon, Kamis (25/8/2022).

Wahana Nufus, Kepala Kantor Keselamatan dan Keamanan Publik Kota Cilegon, Kamis (25/8/2022).

INSTITUT AGAMA ISLAM BANTEN (IAIB) SERANG - BANTEN

YAKREKADISTAS BAH-PT No. 023/SK/BAH/PT/Akad/19/10/2021

PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) PINDAHAN/LANJUTAN

TAHUN AKADEMIK 2022-2023

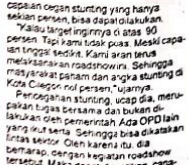
KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
KELOMPOK 1	KELOMPOK 2	KELOMPOK 3
KELOMPOK 4	KELOMPOK 5	KELOMPOK 6
KELOMPOK 7	KELOMPOK 8	KELOMPOK 9
KELOMPOK 10	KELOMPOK 11	KELOMPOK 12

TEMPAT PENDAFTARAN: Kampus Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang, Jl. Ki Pethoni No. 12/31 Serang - Banten

WAKTU PENDAFTARAN: 1 SEPTEMBER - 31 AGUSTUS 2022

PLAT INFORMASI: 08195552197

Cegah Stunting DP3APK2B Roadshow ke Kecamatan



SUASANA roadshow DP3APK2B Kecamatan Perumahan, Perumahan Air, Perumahan Perumahan, dan Perumahan Kota Cilegon dalam program cegah stunting, di Aula Kecamatan Cilegon, Kamis (25/8/2022).

SUASANA roadshow DP3APK2B Kecamatan Perumahan, Perumahan Air, Perumahan Perumahan, dan Perumahan Kota Cilegon dalam program cegah stunting, di Aula Kecamatan Cilegon, Kamis (25/8/2022).

UNTUK mencegah stunting, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMMD) Kota Cilegon menggelar roadshow DP3APK2B Kota Cilegon. Roadshow DP3APK2B Kota Cilegon digelar di Aula Kecamatan Cilegon, Kamis (25/8/2022).

Salah satu target untuk pencapaian Cilegon adalah stunting. "Atas arahan pak wal kota dan pak wada (kecamatan). Kami menggelar roadshow dan memberikan pemahaman bagaimana mencegah stunting serta mengedukasi masyarakat tentang gizi untuk mencegah stunting yang tinggi," kata Kepala DP3APK2B Kota Cilegon Nizamullah, Kamis (25/8/2022).

Salah satu target untuk pencapaian Cilegon adalah stunting. "Atas arahan pak wal kota dan pak wada (kecamatan). Kami menggelar roadshow dan memberikan pemahaman bagaimana mencegah stunting serta mengedukasi masyarakat tentang gizi untuk mencegah stunting yang tinggi," kata Kepala DP3APK2B Kota Cilegon Nizamullah, Kamis (25/8/2022).

Dokumentasi Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana



Dokumentasi Pengelolaan Risiko Bencana



Dokumentasi Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan Kesiapsiagaan (PAM Arus Mudik)



Dokumentasi Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan Kesiapsiagaan (PAM NATARU)



Dokumentasi Penanganan Pasca Bencana (Rapat Koordinasi)



Dokumentasi Penanganan Pasca Bencana (Monitoring)



Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana (DRILL)



Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Apel Siaga Kantor BPBD)



Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Apel Siaga Kantor Walikota Cilegon)



Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana (GOES TO SCHOOL)



Dokumentasi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana



Dokumentasi Respon Cepat Darurat Bencana (Banjir)



Dokumentasi Respon Cepat Darurat Bencana (Pohon Tumbang)



Dokumentasi Respon Cepat Darurat Bencana (Kebakaran Lahan)



Dokumentasi Respon Cepat Darurat Bencana (Longsor Tebing/Rumah Roboh)



Dokumentasi Respon Cepat Darurat Bencana (Kegagalan Teknologi)



Dokumentasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana



Dokumentasi Distribusi Logistik



Dokumentasi Koordinasi Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit

